

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV
LOKAL**

(Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh

DEDE MERCY ROLANDO
NPM : 1441010235

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si

Pembimbing II : Dr.Fitri Yanti,MA

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV
LOKAL**

(Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh

DEDE MERCY ROLANDO

NPM : 1441010235

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si

Pembimbing II : Dr.Fitri Yanti,MA

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV LOKAL

OLEH
DEDE MERCY ROLANDO

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga negara independent di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam penelitian ini penulis mengambil Tegar TV sebagai stasiun tv lokal yang banyak memiliki catatan pelanggaran di tahun 2016. Dengan rumusan masalah Peran KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Siaran TV Lokal (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPID Lampung dalam proses pengawasan isi siaran terhadap Tegar TV. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi historis atau catatan sejarah dengan jenis *confidential reports* sebagai alat pengumpul data utama, wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif interpretative yakni data yang dikumpul, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Dengan jumlah Populasi 27 orang yang berasal dari KPID Lampung dan Tegar TV, kemudian diambil Sample 7 orang dari KPID Lampung dan Tegar TV dengan teknik *Purposive Sampling*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPID Lampung memiliki peran menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, membantu memperbaiki sistem penyiaran, melakukan pemantauan dan menindaklanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV. Sehingga dari peran tersebut melahirkan 4 proses yang dilakukan terhadap Tegar TV yaitu Perencanaan, Pengawasan, Tindakan dan Pembinaan. Ke empat proses tersebut masuk kedalam jenis dan sifat *pengawasan preventif*, *pengawasan concurrent control* dan *pengawasan respresif*. Pengawasan tersebut diketahui cukup efisien dan efektif saat digunakan pada proses pengawasan Tegar TV.

Kemudian terkait peran yang dijalankan oleh KPID Lampung terhadap Tegar TV dapat ditarik kesimpulan bahwa KPID Lampung telah menjalankan Peran nya secara optimal. Efeknya setelah adanya proses pengawasan tidak banyak temuan pelanggaran yang terjadi pada Tegar TV di tahun 2017. Diperkuat pada saat Tegar TV mendapatkan *Award* atau penghargaan dalam kategori *Future* dalam acara KPID Award 2017 pada tanggal 28 november 2017 kemarin

Kata Kunci : Peran, KPID , Pengawasan, Siaran



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Hendro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung Graha Fakultas Dakwah (35131)

PERSETUJUAN

Judul : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN
SIARAN TV LOKAL (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang
Pada Tahun 2016)**
Nama : **Dede Mercy Rolando**
NPM : **1441010235**
Jurusan : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 28 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si
NIP.196104091990031002

Dr.Fitri Yanti,MA
NIP.197510052005012003

Mengetahui,
Ketua Jurusan KPI

Bambang Budiwiranto, M.Ag.,MA(AS) Ph.D

NIP: 197303191997031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Hendro Suratmin, UIN Raden Intan Lampung Graha Fakultas Dakwah (35131)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"PERAN KOMISI INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV LOKAL (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)"**, disusun oleh: **Dede Mercy Rolando, NPM: 1441010235, Jurusan: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)**.
Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 28 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos,M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Septy Anggraini, M.Pd (.....)

Penguji I : Prof.Dr.H.M.Nasor,M.Si (.....)

Penguji II : Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si (.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.S

NIP.196104091990031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teiti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(Q.S. Al-Hujarat 6)



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan Kepada:

Ibunda Karmilah dan Ayahanda Zainuri Bohori

Kakak Ana Mercy Rolando

Sang Motivator yang selalu mendampingi

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 1996. Anak ke-dua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Zainuri Bohori dan Ibu Karmilah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai tahun 2002:

1. SD Negeri 2 Bandar Lampung lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 18 Bandar Lampung lulus tahun 2011
3. SMA Negeri 4 Bandar Lampung lulus tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis masuk di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Penulis pernah berperan dalam bidang organisasi sebagai berikut:

1. Sebagai anggota Marching Band Gita Praja Saburai Provinsi Lampung, Section Colour Guard tahun 2012-2016.

Bandar Lampung, April 2018.

Hormat Saya,

Dede Mercy Rolando

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Shalawat serta salam senantiasa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam segala urusan, pemimpin revolusioner dunia menuju cahaya kemenangan dunia dan akhirat, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TV LOKAL (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)”**.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sekaligus selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Bambang Budi Wiranto,M.Ag,MA(AS)Ph.D sebagai Ketua Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Yunidar Cut Mutia Yanti,S.Sos,M,Sos.I selaku sekretaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr.Fitri Yanti,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta dengan sabar dan bijak dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, bapak Tamri,S.HUT, Ibu Sri Wahyuni,STP.S.Sos. mba Sari Prima Reiza,S.H seluruh sub bagian Kelembagaan, Tata Usaha dan bagian Pembinaan dan Pengawasan yang telah membantu proses penelitian ini.
7. Tegar TV Lampung, bang Billy, kak Ryan dan mba Emi serta seluruh Kru yang telah membantu selama proses penelitian ini.
8. Sahabat sekaligus saudara seperjuangan, KPI C angkatan 2014 (Fanny Nurul Afifah, Woro Purdiningtiyas, Elok Malfindiloka, Dirman Isya Syaputra dan M. Ardaya Maulana.P) terimakasih atas persahabatan. Semoga kita mendapatkan apa yang kita impikan di masa depan.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman hidup.

10. Segenap pihak yang belum disebutkan diatas yang juga telah memberikan sumbangsih kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya ungkapan do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak, dinilai baik oleh Allah SWT. Penulis sadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harapkan kepada para pembaca kiranya dapat memberikan massukan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Dede Mercy Rolando
NPM.1441010235



DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I :PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	14
 BAB II : PERAN DALAM PENGAWASAN SIARAN TELEVISI.....	 22
A. Penyiaran.....	22
1. Regulator Penyiaran	24
2. Kode Etik Jurnalistik.....	27
B. Televisi Sebagai Media Massa.....	33
1. Pengertian Televisi.....	33
2. Jenis-Jenis Penyiaran Televisi.....	35
3. Karakteristik Televisi	38
4. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi	39
5. Fungsi Media Televisi.....	41
6. Program Siaran Televisi	42
C. Peran Dan Pengawasan	48
1. Teori Peran	51
2. Fungsi Pengawasan	53

3. Proses Pengawasan	54
4. Jenis-Jenis Pengawasan	55
5. Sifat dan Waktu Pengawasan	58

BAB III KPID PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN SIARAN TV

LOKAL59

A. Gambaran Umum KPID.....	59
1. Profil KPID Lampung.....	59
2. Visi-Misi KPID Lampung.....	61
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang KPID Lampung.....	61
4. Susunan Organisasi Sekretariat KPID Lampung	64
5. Kode Etik KPID Lampung dalam Pengawasan Isi Siaran	73
B. Gambaran Umum Tegar TV	79
1. Profil Tegar TV	79
2. Visi-Misi Tegar TV	82
3. Susunan Organisasi Tegar TV	83
4. Deskripsi Program Acara Tegar TV Melanggar Tahun 2016.....	83
C. Pengawasan KPID Lampung Terhadap Program Siaran Tegar TV Tahun 2016.....	87

BAB IV PERAN KPID DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN

TELEVISI LOKAL DI BANDAR LAMPUNG114

BAB V PENUTUP.....131

A. Kesimpulan	131
B. Saran	131
C. Penutup.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Perusahaan
Tabel 2	Program Siaran
Tabel 3	Komposisi Siaran
Tabel 4	Profil Penonton
Tabel 5	Catatan Pelanggaran Tegar TV Tahun 2016



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel
Lampiran 2	Pedoman Pengumpulan Data
Lampiran 3	Surat Keputusan Judul Skripsi
Lampiran 4	Pelanggaran Tegar TV Tahun 2016-2017
Lampiran 5	Surat Teguran KPID Lampung Terhadap Tegar TV
Lampiran 6	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 7	Grid Program Siaran Tegar TV 2016-2017
Lampiran 8	Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Penelitian atau Survey
Lampiran 10	Surat Keterangan Bukti Penelitian
Lampiran 11	Kartu Hadir Munasqosah
Lampiran 12	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul penelitian ilmiah. Adapun judul penelitian ilmiah yaitu **“PERAN KOMISI PENYIARA INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN**

SIARAN TV LOKAL (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016)” Maksud judul tersebut dapat ditegaskan sebagai berikut:

Peran (*Role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹ Dengan kata lain, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Peran yang dimaksud penulis disini adalah kewajiban serta tugas dan tanggung jawab dari lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam proses pengawasan isi siaran televisi lokal.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia.² KPID yang dimaksud dalam skripsi ini ialah KPID yang terletak di Jalan Bougenville No.06, Rawa Laut Bandar Lampung, salah satu yang merupakan regulator penyiaran berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dengan adanya KPID Lampung juga untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³ Pengawasan yang dimaksud disini menilai

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI , 2002) h.243

² M.Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung* (Bandar Lampung: 2012) h.2

³ Sujanto , *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), h. 53

kinerja yang dilakukan KPID dalam mengawasi siaran televisi yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Televisi merupakan perpaduan antara radio (*Broadcast*) dan film (*moving picture*).⁴ Melihat jauh disini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima. Perangkat TV adalah siaran TV.

Siaran TV lokal adalah stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten.⁵ Siaran TV yang penulis teliti adalah siaran TV lokal Tegar TV yang berada di Jl.ZA Pagaralam No.12/14 Gedung Meneng Bandar Lampung, karena merupakan TV lokal yang paling banyak melanggar peraturan penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Mengenai penegasan judul diatas dapat ditegaskan, bahwa penulis membahas tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Proses Pengawasan isi siaran televisi lokal periode tayang tahun 2016 pada siaran TV lokal yaitu Tegar TV. Penulis juga mengambil tahun 2016 dikarenakan lebih banyak pelanggaran di tahun tersebut dibandingkan tahun 2017.

B. Alasan Memilih Judul

⁴ Onong U.Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993), h.175.

⁵ Morissan,M.A, *Manajemen Media Penyiaran* (Jakarta: Prenemedia Group, 2008) h.113

Yang menjadi alasan penulis untuk mengambil judul ini karena:

1. Dari banyaknya siaran TV yang beredar serta di konsumsi oleh masyarakat. Ternyata masih banyak program acara yang tidak sesuai dengan etika dan norma, serta tidak sesuai dengan peraturan penyiaran yang berlaku. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana peran KPID dalam menyikapi siaran TV lokal di Indonesia khususnya di Bandar Lampung.
2. Literatur dan Bahan-bahan yang mendukung dalam penelitian lapangan ini banyak tersedia, sehingga penelitian dapat dilakukan selain data-data yang akan langsung didapat di lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Dunia penyiaran yang semakin maju dengan berbagai program siaran baik di televisi swasta maupun lokal, maka penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga penyiaran itu sendiri agar menciptakan siaran yang berkualitas. Karena penyiaran TV sudah bertambah banyak maka pengawasan penyiaran juga harus di kedua stasiun TV swasta maupun lokal. Maka dari itu terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Regional atau terdapat di setiap provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum

pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2002 mengenai penyiaran KPID yang merupakan lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama mengenai tayangan yang di muat di televisi⁶. KPID yang penulis maksud ialah KPID yang berada di Provinsi Lampung yang berada di jl.Bougenville No.06 Rawa Laut Bandar Lampung.

KPID melakukan perannya mempunyai wewenang:

- a. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
- d. Menetapkan standar program siaran.⁷

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya Provinsi Lampung, berperan penting dalam mengawasi siaran televisi khususnya yang ada di Lampung. Dunia Penyiaran di Provinsi Lampung dimulai sejak tahun 1964 bertepatan pada saat berdirinya Provinsi Lampung. Semakin majunya era globalisasi sampai tahun 1970 penduduk di Lampung menikmati tayangan televisi satu satunya yaitu Televisi republik Indonesia (TVRI).⁸

Sementara itu, siaran televisi swasta pertama dari Jakarta yang diterima langsung oleh penduduk Lampung adalah RCTI tahun 1989. Disusul kemudian TPI

⁶ M.Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung* (Bandar Lampung: 2012) h.2

⁷ *Ibid*, h. 4

⁸ *Ibid*, h.34

(MNC TV), ANTV, Indosiar, SCTV, Metro TV, Trans7, Trans TV, Global TV dan tvONE, Untuk stasiun TV lokal Lampung yaitu Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Radar TV.⁹

Dalam menjalankan tugasnya pihak KPID yang mengawasi 5 stasiun TV lokal, Tegar TV lah yang paling banyak melanggar peraturan siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tahun 2016. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu mengenai tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Tayangan televisi yang pada umumnya ditonton oleh seluruh keluarga tanpa memperhatikan batasan umur penontonnya. Problema demikian merupakan suatu yang harus diselesaikan dengan segala kearifan, karena sementara ini tayangan yang kita lihat banyak yang tidak berkenan disanubari.

Problema tersebut sangat dikhawatirkan oleh para orang tua. Karena dapat ditiru oleh anak-anak ataupun para remaja harapan bangsa tanpa memikirkan akibat ataupun dampak negatifnya. Seperti tayangan yang bermuatan sex masuk kedalam Standar Program Siaran (SPS) 18 ayat larangan adegan seksual, tayangan yang menampilkan adegan merokok yang tidak di *blur* dengan SPS 26, kekerasan SPS 70 , menampilkan ungkapan makian atau kasar dengan SPS 24, tidak menampilkan lulus sensor dengan SPS 55 sampai dengan mengenai klasifikasi acara yang masuk kedalam SPS 33 yang tidak membatasi penggolongan program acara tersebut.

⁹ *Ibid*,h.35

Pelanggaran pelanggaran ini sering terjadi pada lembaga penyiaran, yaitu Tegar TV Lampung dalam program acaranya pada tahun 2016. Mulai dari program acara yang bersifat *hardnews* maupun *softnews*. Sebagaimana tayangan tersebut sangat menentang norma kesopanan sehingga bisa merusak norma bangsa.

Televisi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan dan perasaan pada penonton.¹⁰ Apabila diperhatikan secara umum tayangan televisi swasta tersebut mempunyai muatan yang mengawatirkan tidak sesuai dengan moral, jati diri bangsa dan bahkan dengan ajaran agama. Misalnya tayangan yang bermuatan seks, menentang norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dapat merusak sedikit demi sedikit moral bangsa jika dibiarkan begitu saja. Dijelaskan dalam Q.S An-Nuur ayat 19 Dilarang Menyiarkan berita yang bersifat Seksual



إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.41

*mandapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”.*¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang larangan Allah terkait menyiarkan berita yang tidak layak untuk disiarkan melalui media massa atau televisi, seperti berita yang sifatnya pornografi karena dapat mengikis keimanan. sehingga Allah menjamin hukumannya akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat.

Karena, bila tontonan film dikonsumsi orang dewasa terus-menerus ditonton anak secara berulang-ulang, maka pikiran mereka tentu akan terpengaruh. wujud dari pengaruh itu dalam bentuk tindak-tanduk mereka sehari-hari.¹² Sehingga dengan kata lain nilai-nilai yang dianut mereka cenderung sama dengan nilai-nilai yang digambarkan tontonan dewasa tersebut. Mereka menganggap bahwa pergaulan bebas, tindak kejahatan, kekerasan adalah hal yang wajar.

KPID dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi setiap stasiun penyiaran dituntut untuk amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, tidak menyimpang serta mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi yang disiarkan. Karena kebohongan adalah kejahatan yang dibenci Allah, tertuang dalam ayat Al-Quran yang melaknat pembohong. Dalam surat An-Nahl ayat 105 disebutkan:

¹¹ Al-Quran Tajwid, *Q.S An-Nuur* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014) h.351

¹² Drs.Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa* (Jakarta: Rienka Cipta,2008) h.143

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong*”¹³

Sangat jelas di sebutkan dalam ayat diatas bahwa kebohongan adalah perbuatan yang dibenci Allah. Sebagai lembaga pemerintahan yang sebagai wadah aspirasi masyarakat KPID dilarang berbohong dalam menjalankan tugasnya. Selain berbohong lembaga pemerintahan dilarang keras bersifat memihak atau harus berbuat Adil dalam menyeleksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak televisi.

Dalam surat Q.S An-An'am ayat 152 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا وَلَا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ قَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“*...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujur-jujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.*”¹⁴

Yang jelas diperintahkan dalam Islam agar menjadi lembaga yang Adil, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

¹³ Op. Cit, Q.S An-Nahl h.279

¹⁴ Ibid. h.149

Khusus dalam menyebarkan informasi kepada publik tidak boleh memberi pengaruh negatif atau rasa benci terhadap golongan tertentu.

Sehingga untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas KPID mengawasi penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional¹⁵ sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran tentang batasan, pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran serta sanksi berdasarkan P3 yang ditetapkan oleh KPI.¹⁶ Jadi P3 dan SPS saling berkaitan P3 sebagai panduan mengenai batasan perilaku penyiaran dan SPS nya sebagai pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran serta sanksi. Sehingga lembaga penyiaran mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh di tayangkan.

Dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) isi tayangan televisi diharapkan tidak akan menyimpang dan bersesuaian dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyelenggaraan penyiaran di indonesia.

¹⁵ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (ayat 1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 (ayat 1)

Berkenaan masalah diatas penulis tergugah untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran KPID Lampung dalam proses penyiaran terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap isi siaran, dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus terhadap isi siaran Tegar TV yang berada di bawah pengawasan KPID Lampung pada periode 2016.

Objek penelitian ini adalah KPID Provinsi Lampung dan Tegar TV. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Serta pemilihan stasiun TV nya, penulis memilih Tegar TV karena televisi tersebut yang memiliki catatan paling banyak melanggar P3SPS pada tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan KPID Lampung dalam proses pengawasan isi siaran TV Lokal Tegar TV tahun 2016.”

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran KPID Lampung dalam Proses Pengawasan Isi Siaran Tegar TV di Bandar Lampung yang mengacu P3SPS Selama tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

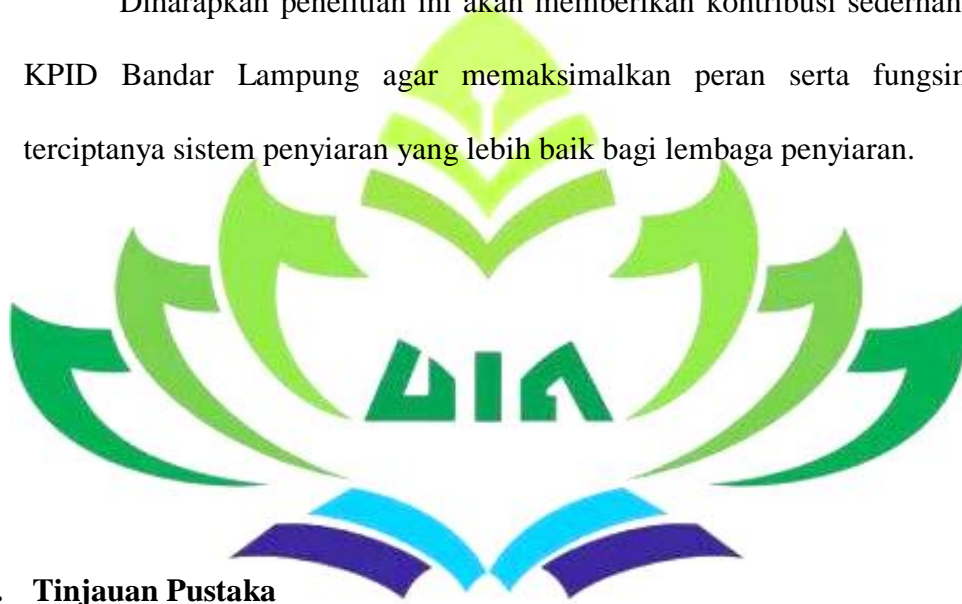
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya di bidang penyiaran , terutama bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya dibidang Komunikasi Penyiaran Islam.

b) Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi sederhana kepada KPID Bandar Lampung agar memaksimalkan peran serta fungsinya agar terciptanya sistem penyiaran yang lebih baik bagi lembaga penyiaran.



F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebelum nya sudah ada yang membahasnya hal tersebut dikarenakan keberadaan lembaga KPID sangat berperan penting dalam industri penyiaran

1. Mohammad Mufasir, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Tahun angkatan 2006 dan penelitiannya

selesai pada tahun 2011. Peran Kpid Lampung Dalam Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung. (studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)¹⁷ Dalam penelitiannya membahas peran KPID dalam mengawasi proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yaitu, Krakatau TV dan Lampung TV yang sudah melakukan izin penyelenggaraan penyiaran. Hasil yang didapatkan ialah terdapat beberapa stasiun TV lokal yang siaran sebelum memperoleh izin IPP, sehingga dapat dikatakan bahwa KPID belum berperan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Devi Rahayu, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2010. Peranan KPI Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen Di Televisi.¹⁸ Dalam penelitiannya penulis menemukan hasilnya yaitu KPI telah menerima aduan dari masyarakat terkait tayangan Infotaimen di televisi, sehingga KPI memberikan sanksi berupa teguran tertulis serta peringatan yang berdasarkan pelanggaran yang dilakukan dan juga KPI mengkaji lebih dalam tayangan-tayangan infotaimen di televisi.

¹⁷ Mohammad Mufasir, *Peran Kpid Lampung Dalam Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung. (studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)*, (Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2011)

¹⁸ Devi Rahayu. *Peranan KPI Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen Di Televisi* (Jakarta: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Syarif Hidayatullah. 2010)

Dari tinjauan pustaka 1 dan 2 masing masing peneliti memiliki fokus yang berbeda-beda. Begitupun jika dibandingkan dalam skripsi ini, yakni sama sama objek penelitiannya KPID namun berbeda mengenai apa yang dibahas. Penulis pertama membahas mengenai izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP terhadap televisi-televisi yang ingin izin kerja dengan hasil beberapa ada yang memperpanjang IPP dan ada yang tidak namun masih beroperasi. Penulis kedua membahas mengenai peranan KPI Pusat terhadap tayangan infotaimen dengan hasil KPI telah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat terhadap program infotaimen dan mengkaji lebih dalam tayangan infotaiment di televisi. Dari kedua tinjauan pustaka tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas, dikarenakan penulis membahas bagaimana semestinya Peran KPID dalam mengawasi televisi lokal, khususnya Tegar TV yang merupakan stasiun lokal yang terhitung banyak melanggar peraturan penyiaran P3SPS di tahun 2016.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah strategi, rencana, proses, atau rancangan yang berada di balik pilihan dan penggunaan metode tertentu dan menghubungkan pilihan dan penggunaan metode untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan.¹⁹ oleh karena itu penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi 2*. (Jakarta: PT.Indeks, 2003) h.6

1. Jenis Penelitian

Secara jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni, penelitian yang dilakukan di lapangan atau di dalam masyarakat yang sebenarnya. Untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.²⁰ data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peran KPID Provinsi Lampung dalam mengawasi isi siaran televisi lokal Tegar TV.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Jalaludin Rahmat adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian dengan menganalisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk pemaparan dengan menggambarkan suatu hal dengan tidak menggunakan angka. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara mendalam Focus Group

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005) h.14

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta :Nawawi, Hadari, 1995), h. 9

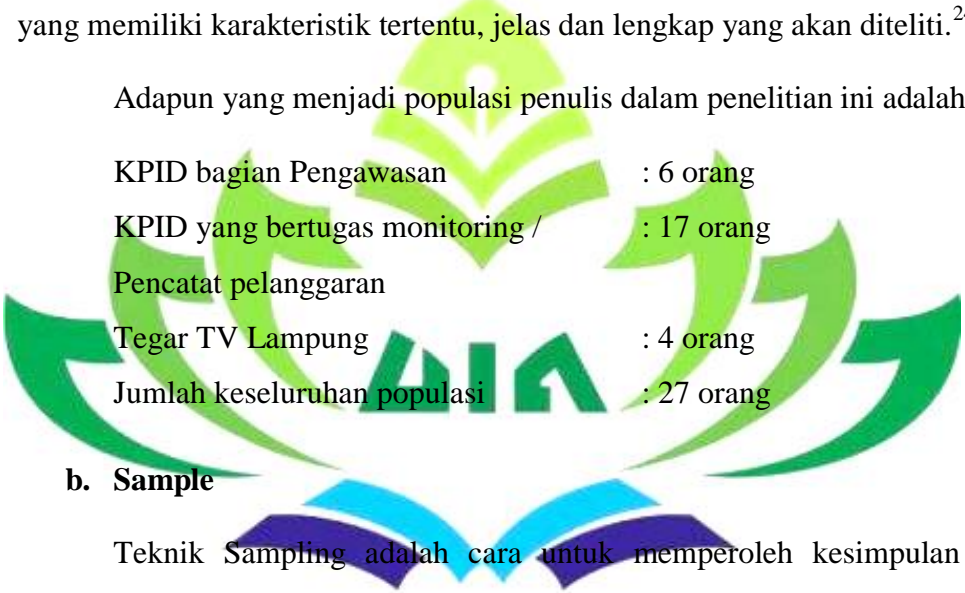
Discussion atau observasi²² Penelitian ini mencoba memahami fenomena dan berusaha tidak memanipulasi fenomena yang diamati.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian. Populasi disebut juga universal, tidak lain daripada daerah generalisasi yang diwakili oleh sample.²³ Menurut M.Iqbal Hasan bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.²⁴

Adapun yang menjadi populasi penulis dalam penelitian ini adalah:



KPID bagian Pengawasan	: 6 orang
KPID yang bertugas monitoring / Pencatat pelanggaran	: 17 orang
Tegar TV Lampung	: 4 orang
Jumlah keseluruhan populasi	: 27 orang

b. Sample

Teknik Sampling adalah cara untuk memperoleh kesimpulan dengan mengambil atau memilih sebagian kecil (sample) dari populasi. Menurut

²² Drs.Jalaludin Rahmad.M.Sc, *metode penelitian komunikasi* (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 24-25.

²³ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998), h.115

²⁴ M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998), h. 58

J. Supranto sample adalah “Kumpulan elemen elemen yang merupakan bagian kecil tau keseluruhan dari populasi penelitian”.²⁵

Dalam pengambilan data penulis menggunakan “*Non Random*” tidak semua penghuni dan pengelola yang sama untuk menjadi informan dalam sample tersebut.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan “*Purposive Sampling*” yang didasarkan pada cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri yang ada dalam populasi.²⁷

Adapun kriteria yang penulis jadikan sample adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Lampung
 - a. Komisioner dan Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran
 - b. Sekertariat pengawasan (UPTD) Bidang Pengawasan Isi Siaran
 - c. Anggota THL yang mengawasi (*Monitoring*) stasiun TV local
- 2) Pihak Stasiun Televisi Lokal Tegar TV
 - a. Kepala Pemograman (*Head Programming*) dan Distribusi
 - b. Perencanaan dan Penjadwalan (*Planning and Schedulling*)
 - c. Program Operation

²⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Aplikasinya dalam Pemasaran*, (UI : Jakarta, 1981), h. 38

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (UGM: Yogyakarta, 1986), Jilid II – h. 82

²⁷ *Ibid*, h. 116

Berdasarkan kriteria di atas, maka yang dijadikan sample dalam penelitian ialah 4 orang pihak KPID dan 3 orang pihak Tegar TV. Jadi total sample yang penulis butuhkan ialah 7 orang.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.²⁸ Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memakai teknik yang sesuai dengan subyek penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian, yang merupakan data utama dari Dokumentasi Pelanggaran Tegar TV tahun 2016, berikut wawancara informan (Pelengkap Data).

b. Sumber Data Sekunder

Pelengkap yang sifatnya melengkapi data yang sudah ada, data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karna sudah diperoleh dari tangan kedua dan selanjutnya, seperti buku-buku referensi, Koran, majalah dan internet ataupun situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.²⁹

5. Alat Pengumpulan Data

²⁸ Suharsin Arikunto, *Ibid* . h. 114

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajahmada universitas Pers: Yogyakarta, 1998), h. 95

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field reaserch*) yang mana penulis menambahkan penelitian langsung ke lapangan.³⁰

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini antara lain dengan menggunakan Dokumentasi, Wawancara dan Obsevasi. Adapun penjabaran dari ketiga teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala sesuatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data dokumentasi sebagai alat utama.

Dokumentasi yang akan penulis gunakan adalah dokumentasi historis atau sejarah yang masuk kedalam *Confidential Reports*. *Confidential Reports* adalah catatan yang dibuat setelah suatu peristiwa terjadi. Umumnya berisi penafsiran penulis terhadap peristiwa. Contoh dokumen ini adalah laporan diplomatic, catatan harian, laporan militer dan lainnya.³² Dokumen yang penulis maksud ialah dokumen yang berisi catatan pelanggaran stasiun TV lokal Tegar TV dalam menjalankan program siarannya yang dipantau atau dimonitoring oleh lembaga penyiaran KPID.

³⁰ Kaelan. *Ibid* ,h.125

³¹ Samiaji Sarosa. *Ibid*, h.65

³² *Ibid*, h. 67

Dokumen yang dimaksud ialah sumber data tertulis dalam kategori sumber resmi, yaitu dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber informasi yang relevan, yaitu mengenai dokumen catatan pelanggaran isi siaran Tegar TV tahun 2016 yang diawasi oleh KPID Lampung.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu partisipan disebut *focus group discussion*.³³ Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Tipe wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara tidak terstruktur yang sifatnya informal, tidak berpedoman pada apapun, sehingga dapat mengeksplorasi suatu topik umum bersama-sama dengan partisipan.

Adapun alat pengumpul data wawancara ini peneliti tujukan kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung serta kepada pihak Tegar TV.

3) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit. Yang dimaksud metode observasi ialah

³³ *Ibid*, h.47

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian ini dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca indra.³⁴ Observasi yang penulis gunakan ialah observasi pengamatan yang mengandung arti peneliti dapat saja hadir dalam keseharian para partisipan tetapi tidak mengambil peran apapun dalam kegiatan para partisipan.³⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bandar Lampung (KPID) dan stasiun TV lokal yaitu Tegar TV yang menjadi sasaran peneliti untuk melakukan pengamatan.

6. Teknik Analisa Data

Tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisa merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal objek penelitian.³⁶ Analisa data yang dilakukan terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi di dalam studi literatur untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang akan diteliti dan disajikan kepada orang lain sebagai temuan.

Data yang bersifat Kualitatif, artinya data yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif interpretatif yakni, dikumpul, disusun kemudian

³⁴ Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PrenadaMedia. 2005) h.134

³⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks.2017) h.61

³⁶ Jalaludin Rahmat. M.Sc, *Ibid.*, h.21

ditafsirkan dan diambil kesimpulan seperlunya. Penafsiran dilakukan dengan cara mengartikan maksud perkataan atau kalimat dari data yang terkumpul dengan dilandasi pendapat dan teori yang telah ada sebelumnya.



BAB II

PERAN DALAM PENGAWASAN SIARAN TELEVISI

A. Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.³⁷ Penyiaran pula dapat dikatakan sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media komunikasi, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial.

Siaran adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara,gambar,atau suara dan gambar atau berbentuk grafis,karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.³⁸ Siaran sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil perpaduan antara kreatifitas manusia dan kemampuan sarana/alat, atau antara perangkat keras dan lunak.

Dimaksud dengan perangkat keras adalah gedung, jalan, studio, kamera elektronika, statip, sistem lampu dan suara, dekorasi, sub dan master control, program continuity, telecine, VTR dan VCR, alat editing, pemancar dan peralatan lain yang

³⁷ Komisi Penyiaran Indonesia ,*Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002* (Jakarta:2016), h.4

³⁸ Hidajanto Djamal , Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) h.45

mendukung produksi dan siaran.³⁹ Namun perangkat keras tersebut juga baru dapat berfungsi bila didukung oleh perangkat lunak, yaitu manusia pengelola dan program siaran.

Proses penyelenggaraan siaran televisi jauh lebih rumit dibandingkan dengan penyelenggaraan siaran radio, demikian juga biaya yang diperlukan jauh lebih besar. Daya penetrasi dan dampak yang ditimbulkan oleh siaran televisi jauh lebih besar dibandingkan dengan siaran radio. Karena, siaran radio hanya menyajikan *informasi audio*, sedangkan siaran televisi menyajikan *informasi audio visual gerak dan sinkron*.⁴⁰

Produksi acara siaran, tidak selalu diselenggarakan di dalam studio, tetapi ada yang diproduksi di luar studio. Produksi di luar studio ini, ada yang hanya direkam untuk keperluan *siaran tunda*, ada yang disiarkan secara langsung (*live broadcast*). Untuk produksi dan siaran langsung di luar studio, diperlukan mobil produksi atau *outside Broadcasting Van* (OB-Van), dan atau seperangkat kamera elektronik lengkap dengan perekam suaranya.

Menurut Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Lembaga penyiaran Pasal 1 ayat 8 adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun

³⁹ J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h.9

⁴⁰ *Ibid*, h.6

lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi:

1. Merencanakan dan memproduksi acara.
2. Mengadakan atau menyiapkan program.
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya.
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain dan production house.
6. Mengadakan penelitian dan pengembangan siaran.
7. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri.
8. Mengadakan promosi dan penjualan program.⁴¹

Dengan demikian perencanaan atau tahapan tahapan kegiatan penyiaran harus dijalani secara bertahap, sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai rencana.

1. Regulator Penyiaran

Sejak disahkan tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h.7-8

⁴² Dr.Judhariksawan, S.H.,M.H. *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.7

Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah public harus dikelol oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintahan dan masyarakat.⁴³ Hal ini mencakup mulai dari proses sampai dengan evaluasi.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang, dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.⁴⁴

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD tingkat provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standard program siaran;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran;

⁴³ *Ibid*, h.9

⁴⁴ *Ibid*, h.10

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku serta standard program siaran;
5. Melakukan kordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan UU Penyiaran, KPI Mempunyai Tugas dan Kewajiban:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industry terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata seimbang;
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan,sangahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.⁴⁶

Dengan demikian KPI dan KPID menjalankan tugas serta kewajibannya hanya berkenaan dengan aspek isi siaran (*Content*) berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyaiarn dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI. P3SPS itu ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid* ,h.11

Indonesia.⁴⁷ Dengan berpedoman pada P3SPS diharapkan dunia penyiaran semakin baik kualitasnya.

2. Kode Etik Jurnalistik

Masing-masing media massa mempunyai kode etiknya sendiri karena memang setiap jenis media massa memiliki karakter atau cirinya masing-masing, maka kita mengenal di dunia ini terdapat kode etik jurnalistik media cetak, radio dan televisi. Diantara ketiga kode etik jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi substansi aturannya, mengapa demikian? Karena siaran televisi menyajikan dua hal sekaligus narasi dan gambar.

Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi, kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar apa saja yang tidak patut ditayangkan.

Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Televisi dapat digunakan untuk menghasut kebencian antar kelompok, televisi digunakan sebagai alat untuk

⁴⁷ Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana, 2010) h.172

meningkatkan kebencian antaretnis dan pada akhirnya menimbulkan pembunuhan terhadap satu etnis.⁴⁸ Gambar televisi juga sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Tontonan televisi sering dipersalahkan sebagai penyebab tidak kekerasan, perbuatan asusila atau tindakan kriminal lainnya.

Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaan.

Tayangan televisi memberikan implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-undang No.32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas dua:

⁴⁸ Morissan, M.A., *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta : Kencana, 2010), h.244

1. Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pasal 42 Undang-undang Penyiaran menyebutkan: “wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Pelanggaran teknis administratif, misalnya: pelanggara ketentuan mengenai izin penyelenggara siaran sampai mengenai laporan keuangan.⁴⁹

Sanksi diberikan UU terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp.5 miliar hingga Rp.10 miliar atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administratif terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana meliputi:

Pasal 36 Ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang:

- a. Bersifat Fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang

⁴⁹ *Ibid* , h.245

- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan anatar golongan.⁵⁰

Pasal 36 Ayat (6) yang menyatakan isi siaran televisi dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan atau mengambaikan nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia atau merusak hubungan internasional.⁵¹

Pasal 46 Ayat (3), dalam hal menyiarkan iklan, maka dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau meredahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, dan kelompok lain.
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif
- c. Promosi rokok yang memperagakan wuujud rokok
- d. Hal-hal yang bertetangan dengan kesusilaan nasyarakat dan nilai-nilai agama.
- e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun.⁵²

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administratif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan
- b. Lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 Ayat 2)

⁵⁰ *Ibid*, h.246

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

- c. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Pasal 36 Ayat 3)
- d. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 Ayat 4)
- e. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (Pasal 43 Ayat 2).
- f. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadi kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita (Pasal 44 Ayat 1)
- g. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (Pasal 46 Ayat 6)⁵³

Segala ketentuan mengenai kode etik dalam undang-undang 32/2002 sebagaimana yang dijelaskan, merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku

⁵³ *Ibid*, h.247

Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.⁵⁴

Pedoman Prilaku Penyiaran merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.⁵⁵

Demikian, P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan kode etik dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 yang masih bersifat umum. Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan isi standar yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a) nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b) norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.⁵⁶

Sesuai kodratnya, stasiun TV menjangkau semua golongan, ras, maupun usia, sehingga stasiun TV harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkan tidak merugikan, menimbulkan efek negatif atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar kelompok tertentu.

⁵⁴ *Ibid*, h.248

⁵⁵ Muhammad Mufid, M.Si. *Ibid*, h.172

⁵⁶ *Ibid*, h.248

Stasiun TV harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperlihatkan realitas dan pertimbangan tentang efek negatif yang dapat ditimbulkan dari siaran yang memuat adegan kekerasan, kecelakaan dan bencana.

Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan sudah tidak menonton televisi, yakni pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Stasiun TV dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan dianggap diluar perikemanusiaan atau sadistik atau yang dapat dipersepsikan sebagai mengagungkan kekerasan atau mejustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

B. Televisi Sebagai Media Massa

1. Pengertian Televisi

Drs.J.B.Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul Media Komunikasi Massa Televisi mengemukakan Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu *tele* (bahasa Yunani) yang berarti *jauh*, dan *visi* (videre-bahasa Latin) yang artinya *penglihatan*. Dan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya Television yang diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh disini

diartikan dengan, gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) yang dapat dilihat dari tempat lain, melalui perangkat penerima (televisi set).⁵⁷

Televisi paling berpengaruh bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan semua media komunikasi lain. Adalah suatu anugrah bagi kita dengan adanya televisi yang memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Beragam stasiun televisi dengan bermacam-macam program siarannya yang disajikan dengan kualitas gambar dan tatanan suara yang apik serta menarik, menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita dan hiburan yang dibutuhkan masyarakat.

Televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul Nipkow dari Jerman yang dilakukannya pada tahun 1884, ia menemukan sebuah alat yang kemudian disebut sebagai *Jantara Nipkow* atau *Nipkow Scheibe*. Penemuannya tersebut melahirkan *electrische teleskop* atau televisi elektrik.⁵⁸

⁵⁷ J.B.Wahyudi, *Media Komunikasi Massa Televisi* (Bandung: Alumni, 1986), h.49

⁵⁸ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h.5

Televisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menggunakan teknologi rumit dalam praktek penyelenggaraan siaran. Diantaraya menggunakan alat transmisi, kamera, ruang kontrol, microphone, pita kaset, antena, satelit dan lain sebagainya.
- b. Memiliki kecepatan. Media televisi lebih cepat menjangkau khalayak, juga tercepat dalam menyajikan informasi.
- c. Dalam penyelenggaraan komunikasi massa, media televisi membutuhkan personil, dana, serta teknologi relative besar dibandingkan media massa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh target khalayak yang dijangkau sangat besar.⁵⁹

2. Jenis – Jenis Penyiaran Televisi

Menurut Ketentuan Umum UU 32/2002 “lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku”⁶⁰

1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional dari APBD untuk stasiun pusat yang berkedudukan di ibu kota, Jakarta. LPP mencakup wilayah siaran secara nasional (jangkauannya luas).

⁵⁹ *Ibid*, h.6

⁶⁰ Pasal 1, butir 9, ketentuan umum, UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), merupakan stasun penyiaran yang mendapatkan dana dari swadaya melalui iklan dan jasa jasa produksi lainnya. LPS mencakup siaran secara lokal dan berjangkauan sehingga jangkauan siarannya terbatas.
3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), merupakan lembaga yang didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), merupakan stasun penyiaran yang mendapatkan dana dari siaran iklan, iuran para pelanggan, dan jasa-jasa pembuatan produksi serta jasa akses internet.⁶¹

Dijelaskan bahwa media penyiaran yang disebut juga dengan lembaga penyiaran memiliki beberapa jasa penyiaran baik di radio maupun di televisi. Keempat lembaga penyiaran tersebut memperoleh dana baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sesuai kategorinya yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan, menurut Morrisson, M.A jangkauan siarannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Stasiun Lokal, merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten.

⁶¹ Hidajanto Djamal, *et.al. Ibid*, h.56

2. Stasiun Nasional, merupakan televisi atau radio yang menyiarkan program nya ke sebagian besar wilayah Negara dari hanya satu stasiun penyiaran saja.⁶²

3. Stasiun berjaringan memiliki dua pihak, yaitu:

a. Stasiun Jaringan yang merupakan stasiun induk yaitu stasiun penyiaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada dasarnya tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk dapat menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal.

b. Stasiun Lokal yang berkerja sama (*berafiliasi*) dengan salah satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran lokal, dimana stasiun afiliasi berada.⁶³

Berdasarkan jangkauan siaran yang dimiliki, masalah jangkauan siaran ini merupakan faktor yang sangat penting bagi pemasang iklan atau yang ingin berpartisipasi, yang merupakan perusahaan atau produsen dalam mempromosikan dan memasarkan produknya (Barang atau Jasa) kepada khalayak karena terkait dengan wilayah pemasaran yang dimilikinya masing-masing.

⁶² Morissan, M.A, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi* (Jakarta: Prenemedia Group, 2008) h.113

⁶³ *Ibid*, h.115

3. Karakteristik Media Televisi

JB. Wahyudi dalam buku *Dasar Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi* mengemukakan bahwa karakteristik Media Televisi meliputi :

- 1) Informasi disampaikan kepada komunikan melalui proses pemancaran atau transmisi.
- 2) Si pesan audiovisual. Artinya, dapat didengar dan dilihat secara bersamaan pada waktu pada siaran.
- 3) Sifatnya periodik, tidak dapat diulang.
- 4) Serentak dan global
- 5) Meniadakan jarak dan waktu
- 6) Dapat menyajikan peristiwa atau pendapat yang sedang terjadi, secara langsung atau orisinal.
- 7) Bahasa yang digunakan formal dan nonformal (bahasa tutur).
- 8) Kalimat singkat, padat, jelas dan sederhana
- 9) Tujuan akhir dari penyampaian pesan untuk menghibur, mendidik
- 10) kontrol sosial⁶⁴

Artinya, siaran dari suatu media televisi mempunyai karakteristik yang menguasai ruang. Sehingga dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali.

⁶⁴ J.B.Wahyudi, *Dasar Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi*, (Grafiti, Jakarta 1996) hlm. 8-9

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi

Televisi sebagai media massa memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan televisi bisa dilihat dari sisi pragmatis dan teknologis.⁶⁵

Kelebihan televisi dari sisi pragmatis adalah sebagai berikut;

- 1) Menyangkut isi dan bentuk, media televisi meskipun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas dan tidak terbatas.
- 2) Memiliki khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim.
- 3) Memiliki tokoh berwatak (riil maupun rekayasa), sementara media lain (film) hanya memiliki bintang yang rekayasa.⁶⁶

Kelebihan televisi dari sisi teknologis adalah kemampuan televisi dalam menjangkau wilayah yang sangat luas dalam waktu yang bersamaan. Sehingga televisi dapat mengantarkan secara langsung suatu peristiwa di suatu tempat yang lain yang berjarak jauh. Televisi juga mampu menciptakan suasana yang bersamaan di berbagai wilayah jangkauannya, mendorong pemirsa mendapatkan informasi dan berinteraksi secara langsung.

Televisi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah :

- 1) Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek yang pasif sebagai penerima pesan

⁶⁵ A. Alatas Fahmi. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, (YPKMD Jakarta 1997) h.30

⁶⁶ *Ibid.* h.31

- 2) Mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan budaya dan peradaban yang ada di wilayah jangkauannya.
- 3) Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol dampak negatifnya.
- 4) Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu cepat mendahului perkembangan masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada gilirannya melahirkan pro dan kontra tentang implikasi kultural dari televisi.
- 5) Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi dan lebih berorientasi pada pertimbangan komersial atau bisnis sehingga menyampingkan faktor pendidikan.⁶⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujuraat ayat 6:



*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teiti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujuraat:6)*⁶⁸

Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa untuk itu kita selaku muslim yang cerdas sebaiknya mencerna informasi dengan sebaik-baiknya. Tidak

⁶⁷ Ibid. h.32

⁶⁸ Al-Quran Tajwid, Q.S.Al-Hujuraat (jawa barat: Cipta Bagus Segara,2014) h.516

menelan berita mentah-mentah. serta mengambil hikmahnya agar suatu yang buruk tidak menimpa kita.

5. Fungsi Media Televisi

“Seperti halnya dengan media massa lainnya, Televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan dan hiburan”.⁶⁹

a. Fungsi Penerangan (The information function)

Dalam melaksanakan fungsinya menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata atau berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi dengan gambar-gambar yang sudah faktual.⁷⁰

b. Fungsi Pendidikan (The education function)

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh dalam menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara simultan.⁷¹

c. Fungsi Hiburan

Di kebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan.⁷²

⁶⁹ Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, (Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1994). h.78

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *ibid.* h.26

Selain fungsi diatas ada pendapat yang dikemukakan Nuruddin dari bukunya yang berjudul pengantar komunikasi massa, fungsi media televisi yaitu:

- a) Fungsi Informasi, Sebagai sarana informasi dalam bentuk siaran yang mampu memuaskan khalayak dengan efek audio dan visual.
- b) Fungsi Hiburan, Siaran yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga yang berupa gambar hidup yang dapat dimengerti.
- c) Persuasi atau Mempengaruhi penonton
- d) Media edukasi atau Pendidikan merupakan Sarana yang ampuh menyebarkan pendidikan ke khalayak dengan jumlah besar dan disampaikan secara simultan.
- e) Kontrol sosial
- f) Korelasi atau berfungsi menghubungkan dengan masyarakat dan lingkungan.⁷³

6. Program Siaran Televisi

a. Pengertian Program Televisi

Program siaran didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan, sehingga memberikan pengertian bahwa dari siaran tersebut ada yang diudarakan dan tersusun dari beberapa program siaran.⁷⁴ Sedangkan menurut Morisson, program adalah

⁷² *Ibid.*

⁷³ Nuruddin. Pengantar Komunikasi Massa. (Jakarta: RajaGrafindo.2007), h.63-82

⁷⁴ Hidajanto Djamal. *Et.al. Ibid.* h.159

segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.⁷⁵

Program acara merupakan ujung tombak kekuatan televisi. Program acara menentukan ditonton atau tidaknya televisi. Bagi perusahaan TV swasta, hasil penjualan program dapat menghasilkan pemasukan keuntungan. Sedangkan bagi televisi nonkomersial seperti televisi pendidikan, televisi komunitas dan televisi publik mendapat keuntungan berupa investasi peradaban masyarakat, tambahan wawasan berbagai hal, dan lebih dari itu dapat mempercepat kepandaian seseorang karena program-programnya sama sekali tidak mengutamakan promosi pihak lain.⁷⁶

Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat satu rumusan di dalam dunia penyiaran yaitu, program yang baik akan mendapatkan penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan penonton.

b. Jenis-Jenis Program Televisi

Berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu berita dan program hiburan (*entertainment*).

⁷⁵ Morissan, *Menejemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio Dan Televisi*, (Bandung: Ramdina Prakarsa 2005), h.97

⁷⁶ *Ibid.* hlm.2

Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).⁷⁷ Penjelasan lebih rinci akan dibahas dibawah seperti berikut.

1. Program Informasi

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Program informasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).⁷⁸

a. Berita Keras (*Hard News*)

Berita keras atau *hard news* adalah jenis berita langsung yang memiliki sifat *timely* atau terikat waktu. Berita ini sangat tergantung pada aktualitas waktu. Jika mengalami keterlambatan berita maka akan menyebabkan berita basi.⁷⁹ Contohnya: kecelakaan, bencana alam, rapat cabinet maupun meninggalnya orang terkenal.

b. Berita Lunak (*Soft News*)

Berita lunak atau *soft news* adalah berita tidak langsung yang tidak memiliki sifat *timeless* atau tidak terikat waktu. Jenis berita ini tidak

⁷⁷ Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013) h.6

⁷⁸ *Ibid*, h.218

⁷⁹ *Ibid*, h.7

tergantung pada waktu, sehingga bisa selalu dibaca, didengar dan dilihat kapanpun.⁸⁰ Contohnya penemuan ilmiah atau kisah tragis.

Program informasi dalam kategori berita keras atau berita lunak berdasarkan sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbedaan *Hard News* dan *Soft News*⁸¹

Hard news	Soft news
Harus ada peristiwa terlebih dahulu	Tidak mesti ada peristiwa terlebih dahulu
Aktual	Tidak aktual
Bersifat segera disiarkan	Tidak bersifat segera
Mengutamakan informasi penting	Menekankan pada detail
Tidak menekankan sisi <i>human interest</i>	Sangat menekankan segi <i>human interest</i>
Singkat	Bersifat mendalam
Teknik penulisan piramida tegak	Teknik penulisan piramida terbalik
Ditayangkan dalam program berita	Ditayangkan dalam program lain.

2. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan. Program

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Morissan. *Ibid.*, h.219

yang termasuk kedalam kategori hiburan adalah drama, permainan, musik dan pertunjukan.

a. Drama

Program Drama adalah pertunjukan (Show) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program televisi yang termasuk kedalam program drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan film.⁸²

- Sinetron

Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan.⁸³ Sedangkan menurut Wawan Kuswandi sinetron adalah sebuah sinema elektronik tentang sebuah cerita yang didalamnya membawa misi tertentu kepada pemirsa.⁸⁴

- Film

Film disini adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan perusahaan film. Karena tujuan pembuatannya adalah untuk layar lebar, maka biasanya film baru bisa ditayangkan di televisi setelah terlebih dahulu ditunjukan di bioskop atau bahkan setelah film itu didistribusikan

⁸² *Ibid.* h.223

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Drs.Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa* (Jakarta: RinekaCipta,2008) h.120

dalam bentuk VCD atau DVD.⁸⁵ Dengan demikian televisi menjadi media paling akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya.

b. Permainan

Permainan (*game show*) merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun berkelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Quiz Show, yang merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan intelektualitas.
- 2) Ketangkasan, yang merupakan permainan yang menunjukkan kemampuan fisik untuk melakukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi.
- 3) Reality Show, adalah program yang menyajikan suatu keadaan yang nyata dengan cara sealamian mungkin tanpa rekayasa.⁸⁶

c. Musik

Program musik dapat disampaikan dalam dua format, yaitu videoklip atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan (*outdoor*) ataupun didalam studio (*indoor*). Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien. Tidak hanya dari

⁸⁵ *Ibid.* h.224

⁸⁶ *Ibid.*

kualitas suara, namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik.⁸⁷

d. Pertunjukan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada sesuatu lokasi baik di studio maupun di luar studio. Dapat dikatakan program pertunjukan adalah jenis program yang paling banyak di produksi sendiri oleh stasiun televisi (*in-house*).⁸⁸ Contohnya pertunjukan lawak, sulap, lenong, wayang, ceramah agama dan lain sebagainya.

C. Peran dan Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan (G.R.Terry) dalam buku J.B.Wahyudi, Pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan atau kesalahan tindak dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah agar kesalahan itu tidak terulang.⁸⁹

Namun sebelum melakukan pengawasan perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Menurut Coghlan dan Brannick dalam buku penelitian kualitatif dasar dasar, dalam perencanaan merujuk pada siklus yaitu:

⁸⁷ *Ibid*, h.229

⁸⁸ *Ibid*, h.220

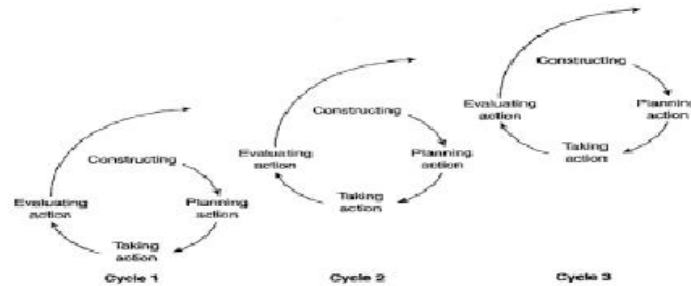
⁸⁹ J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.92

1. Merumuskan konteks dan tujuan sebagai persiapan pra penelitian.
2. Membangun (*constructing*) adalah tahap diagnosis masalah
3. Merencanakan tindakan (*planning action*) adalah tahap dimana terdapat masalah maka diadakan tahap perencanaan solusi
4. Melaksanakan tindakan (*taking action*) adalah tahap implementasi solusi
5. Evaluasi tindakan (*evaluating action*) adalah tahap evaluasi untuk menguji apakah solusi yang di implementasikan cocok dan menyelesaikan masalah atau tidak.⁹⁰

Artinya, pengawasan dimulai dengan perencanaan sesuai SOP, lalu menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi. Dalam dunia penyiaran, langkah pengawasan lebih tepat diterapkan secara akurat, khususnya sebelum materi disiarkan, sementara dipergunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikut dengan tujuan agar siaran dapat lebih baik, dan atau kesalahan yang terjadi tidak sampai terulang lagi.

Sebagaimana terdapat siklus *Action Research* atau Perencanaan berlangsung dan berulang sampai dicapai kesepakatan untuk menghentikannya.

⁹⁰ Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi 2*. (Jakarta: PT. Indeks, 2017) h.117



Gambar 1: Siklus *Action Research* (Diadaptasi dari Coghlan & Brannick 2010)⁹¹

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa antara perencanaan dan pengawasan ada keterkaitan sangat erat. Pelaksanaan harus sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan pada perencanaan. Penyimpangan dari perencanaan, berarti suatu kekeliruan, untuk itu perlu segera diambil langkah koreksi secara dini, agar penyimpangan itu tidak semakin besar.

Dalam dunia penyiaran, akan lebih tepat bila sistem kontrol dilakukan secara *pengendalian* oleh semua pimpinan/manajer harus menguasai di semua tingkatan. Hal ini mengingat output siaran memiliki dampak sangat luas di masyarakat. Dengan kata lain, *pengawasan preventif* atau *pencegahan* (pengendalian) jauh lebih repat diterapkan. Kesalahan dapat diketahui secara dini dan diperbaiki sebelum materi itu disiarkan. Harus disadari bahwa dalam dunia peyiaran, *ralat* sangat tidak efektif karena sifatnya yang sekilas.⁹²

⁹¹ *Ibid.*

⁹² J.B.Wahyuni. *Op.Cit.*

Peranan pengawasan dan pengendalian dalam organisasi dan manajemen adalah upaya pecegahan dan penanggulangan penyimpangan dalam proses perencanaan serta kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang pada akhirnya membentuk siklus pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.⁹³

Dunia penyiaran memerlukan langkah ekstra hati-hati, karena “bila siaran baik akan dianggap wajar oleh khalayak, tetapi bila siaran jelek bahkan salah maka khalayak akan mneghakiminya”.⁹⁴ Begitu pun cara kerja KPID selaku lembaga pengawasan di bidang penyiaran, mengawasi berdasarkan UU yang berlaku dan berpedoman pada P3SPS sehingga pengawasan yang dilakukan oleh KPID tersebut berjalan sesuai aturan dan berlandaskan hukum.

1. Teori Peran

Menurut Sarlito Wirawan S, Teori Peran ialah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi , teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.⁹⁵ Sedangkan pendapat lain Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (stasus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

⁹³ *Ibid*, h.93

⁹⁴ *Ibid*, h.95

⁹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Cet-10 h.224

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.⁹⁶ Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Peran merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada dalam satu kelompok social tertentu. Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.⁹⁷

Peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi akan selalu berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Maka peran diibaratkan seperti dua mata sisi uang yang berbeda akan tetapi kekekatannya sangat terasa, seseorang dikatakan memiliki peranan karena orang tersebut memiliki status dalam masyarakat. Walaupun kedudukan ini berbeda antara satu orang dengan yang lain, akan tetapi masing masing dirinya berbeda sesuai statusnya.

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah yang menyangkut:

1. Orang orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
2. Prilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang orang dalam prilaku
4. Kaitan antara orang dan prilaku⁹⁸

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) h.213

⁹⁷ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Eresco, 1998) hlm.135

⁹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Ibid* ,hlm.215

Sedangkan menurut Anton M. Moeliono (1990:667) Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Namun, menurut Soerjono, Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁹⁹

Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang direncanakan.

Fungsi pengawasan itu sendiri adalah:

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
- b) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak tergantikan

⁹⁹ Onong Uchjana Efendi, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandar Maju, 1989) h.108

- d) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.¹⁰⁰

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh KPID mempunyai fungsi tersendiri yaitu untuk membuat dunia penyiaran menjadi berkualitas dan lebih baik.

3. Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.

Menurut Oteng Sutisna, dilihat sebagai proses tindakan pengawasan terdiri dari empat langkah yaitu:

- 1) Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran/penilaian
- 2) Mengukur/menilai perbuatan yang sedang di lakukan
- 3) Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada.
- 4) Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, h.96

¹⁰¹ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek* (Bandung: Angkasa,1993), h.240

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam proses pengawasan ditemukan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Penyimpangan, yaitu upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan
- 2) Membandingkan standar dengan kenyataan, segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran standar sesuai dengan rencana
- 3) Penilaian Prestasi
- 4) Analisis Penyebab
- 5) Tindakan koreksi ¹⁰²

Sehingga dengan adanya proses pengawasan tersebut suatu lembaga penyiaran ataupun lembaga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

a) Pengawasan Langsung dan Tak Langsung.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima

¹⁰² *Ibid*

laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan Tak Langsung

Pengawasan tak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.¹⁰³

b) Pengawasan Preventif dan Respresif

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁰⁴. Pengawasan ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dll.¹⁰⁵

¹⁰³ Victor M.Situmorang,S.H.,Jusuf Juhir,SH. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan aparatur Pemerintah*. (Jakarta:Rineka Cipta,1993) h.27

¹⁰⁴ Soewarno Handyaningrat, *Pengatur Ilmu Adminstrasi Manejemen* (Jakarta: Masasung, 1988), h.143

¹⁰⁵ Victor M.Situmorang,S.H, Jusuf Juhir,S.H. *ibid*.h.28

2. Pengawasan Respresif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali.¹⁰⁶ Adapun pengawasan ini dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.¹⁰⁷

c) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1. Pengawasan Intern

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang bentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Soewarno Handyaningrat, *Ibid.*

¹⁰⁷ *Op.Cit.*

¹⁰⁸ Victor M.Situmorang,S.H, Jusuf Juhir,S.H, *ibid.*

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan dari luar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi¹⁰⁹.

5. Sifat dan waktu Pengawasan

ada 3 tipe dasar pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan pendahuluan ini sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.¹¹⁰ Jadi, pengawasan ini lebih agresif dan aktif, dengan mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Control*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu

¹⁰⁹ *Ibid*, h.29

¹¹⁰ T.Hani Handoko. *Manajemen Edisi 2*. (Yogyakarta: BPFE, 1984) h.361

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.¹¹¹ Pengawasan ini dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan untuk mengukur hasil hasil suatu kegiatan yang telah diselesaikan.¹¹²

Melalui berbagai macam jenis dan sifat pengawasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan Pengawasan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijaksanaan, aturan main, dan tujuan organisasi. Artinya, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi.

Dalam dunia penyiaran, langkah pengawasan lebih tepat diterapkan secara akurat, khususnya sebelum materi disiarkan, sementara dipergunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikut dengan tujuan agar siaran dapat lebih baik, dan atau kesalahan yang terjadi tidak sampai terulang lagi

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*h.362

BAB III

KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Siaran TV Lokal

A. Gambaran Umum KPID Provinsi Lampung

1. Profil KPID Provinsi Lampung

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.¹¹³ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya Provinsi Lampung yang berrada di Jl.Bougenville No.06 Rawa Laut Bandar Lampung ini berperan penting dalam mengawasi siaran televisi khususnya yang ada di Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 7 ayat (3). KPID berkedudukan di ibukota Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan berdasarkan Keppres No.267/M/2003 dan anggota KPI daerah berjumlah 7 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹¹⁴ Anggota KPI Pusat dipilih DPR dan KPID dipilih DPRD atas usul masyarakat melalui uji keptutan dan keyalakan secara terbuka. Secara Administratif anggota KPID bertanggung jawab kepada Gubernur.

¹¹³ Dokumen KPID Provinsi Lampung, Tahun 2016.

¹¹⁴ *Ibid.*

KPID Provinsi Lampung telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Lampung No. G/121/IV.06/HK/2011 Tanggal 14 Maret 2011 untuk masa jabatan 2011-2014. Untuk membantu dan memfasilitasi anggota KPID (komisioner) telah dibentuk secretariat KPID Provinsi Lampung sesuai dengan Perda No. 12 tahun 2009. Bahwa dibentuknya KPID Berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan social,budaya, politik dan ekonomi.¹¹⁵

Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan dalam kegiatan-kegiatan Regulasi (Pengaturan), Pengawasan dan Pengembangan.

Dalam menjalankan tugasnya pihak KPID yang mengawasi 5 stasiun TV lokal di Lampung yaitu , Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV, dan Radar TV.¹¹⁶ Namun sehubungan dengan judul yang penulis kaji stasiun Tegar TV lah yang paling banyak melanggar tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2017.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Sri Wahyuni,STP, Wawancara dengan Koorbid.Pembinaan dan Pengawasan KPID Lampung, Tanggal 20 Februari 2018

2. Visi dan Misi KPID Provinsi Lampung

a) Visi

Terwujudnya sistem penyiaran Nasional dan Daerah yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹⁷

b) Misi

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antara wilayah indonesia, juga antara indonesia dan dunia internasional.
3. Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiran yang sehat dan bermartabat.
4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai nilai dan budaya indonesia
5. Menetapkan perencanaan dan peraturan serta pengembangan sdm yang menjamin profesionalitas penyiaran.¹¹⁸

3. Peran, Fungsi, Tugas dan Wewenang KPID Provinsi Lampung

Peran dan Fungsi KPID sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi masyarakat akan penyiaran. KPID juga menjadi akses yang menjembatani kepentingan masyarakat

¹¹⁷ Dokumen KPID Lampung Tahun 2016

¹¹⁸ *Ibid.*

dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran baik itu Radio, TV (Swasta, Publik, Komunitas maupun Berlangganan). KPID wajib mengusahakan agar terciptanya suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.¹¹⁹

Peran dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 berbunyi:

- 1) KPI Sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang diantaranya adalah mengawasi Peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran serta memberikan sanksi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung adalah lembaga indepeenden yang berperan mengatur hal hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenang nya diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran.

1. Tugas :

- a. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia
- b. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- c. Ikut membantu infrastruktur dibidang penyiaran.

¹¹⁹ *Ibid*

- d. Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran.
- e. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.¹²⁰

2. Wewenang :

- a. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- c. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
- d. Menetapkan standar program siaran.
- e. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perilaku penyiaran serta standar program siaran.¹²¹

4. Susunan Organisasi KPID Lampung

**Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Lampung**



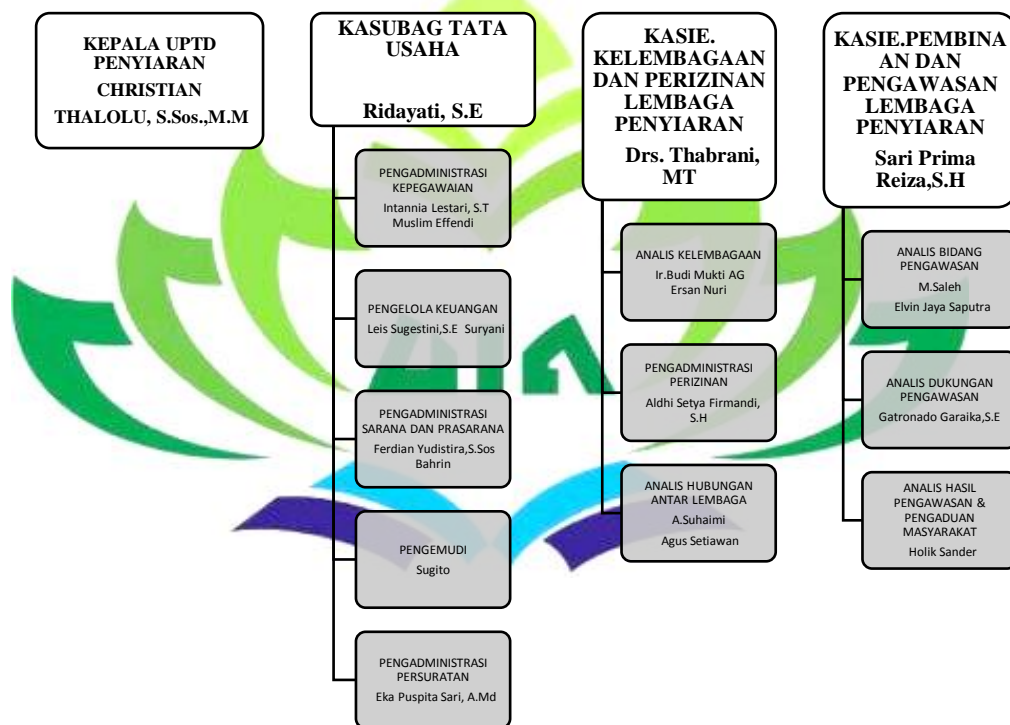
Sumber: *Dokumentasi* Anggota KPID Provinsi Lampung 2015-2018.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Berdasarkan susunan organisasi anggota KPID provinsi lampung tersebut, diketahui bahwa pengurus mulai dari ketua, wakil ketua, berikut Koordinator kelembagaan, pembina penyiaran dan perizinan berjumlah 7 orang yang dipilih langsung oleh Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung dengan masa jabatan 3 tahun, dan dibantu oleh bagian sekretariat yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung



Sumber: *Dokumentasi* Anggota Sekretariat KPID Provinsi Lampung 2015-2018¹²³

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

Kedudukan Sekretariat KPID dan Staf yang membantu KPID dalam menyelenggarakan Kesekretariatan di lingkungan KPID. Sekretariat KPID secara teknis dan oprasional bertanggung jawab kepada gubernur. Adapun fungsi Sekretariat KPID tersebut ialah Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan, fasilitas teknologi penyiaran, pemberdayaan masyarakat sampai urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan.¹²⁴

Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat

Bertugas:

- a. Memfasilitasi komisioner dalam merumuskan rencana strategis dengan mengacu pada rencana srategis pemerintahan Provinsi Lampung dan KPI Pusat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat KPID Provinsi Lampung
- b. Penyusunan program Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- c. Penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran
- d. Pelaksanaan koordinasi proses penyiaran
- e. Melaksnakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk melancarkan pelaksanaan tugas.

¹²⁴ Sari Prima Reiza,S.H. Wawancara Kasie.Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran KPID Lampung, Tanggal 20 Februari 2018.

- f. Menjabarkan dan melaksanakan tugas bersama Komisioner sebagaimana ketentuan yang telah digariskan pada kementerian Kominfo dan KPI Pusat.¹²⁵

2. Kepala Sub Bagian Umum

Bertugas:

- a. Melakukan kegiatan kearsipan kearsipan dan persuratan keluar masuk surat untuk diangandakan dengan berdasarkan petunjuk teknis agar memperoleh hasil administrasi umum yang benar.
- b. Melakukan kegiatan pekerjaan administrasi kepegawaian dalam pengelolaan DUK, kenaikan Pangkat, kenaikan gaji.¹²⁶

3. Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum

Bertugas:

- a. Memberi petunjuk kegiatan dengan berdasarkan petunjuk teknis agar memperoleh hasil siaran radio maupun televisi sesuai dengan P3SPS.
- b. Memeriksa hasil pembinaan berdasarkan petunjuk teknis sehingga siaran radio maupun televisi agar tertib sesuai dengan undang-undang penyiaran.
- c. Melakukan tindak lanjut atas pengawasan radio dan televisi atas izin siaran yang tidak mendapat IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran)
- d. Meningkatkan penyebaran informasi kepada khalayak provinsi lampung tentang siaran yang bermutu dan layak untuk di tonton maupun di dengar.

¹²⁵ Dokumen KPID Lampung Tahun 2016

¹²⁶ *Ibid.*

- e. Merencanakan kegiatan tahunan mendatang, berdasarkan hasil kerja yang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan untuk penyusunan program kerja tahun berikutnya.¹²⁷

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Bertugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi
- b. Menyusun rencana kerja tahunan dengan menjabarkan dalam program, sasaran dan anggaran untuk dijadikan indikator keberhasilan satuan kerja.¹²⁸

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Bertugas:

- a. Merencanakan program dan kegiatan keuangan
- b. Menyusun rencana kinerja tahunan dengan menjabarkan dalam program, sasaran dan anggaran
- c. Menyusun rencana oprasional kegiatan sesuai kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan baik administrasi maupun oprasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.¹²⁹

6. Program kerja KPID Lampung:

I. Bidang Kelembagaan

Bidang kelembagaan bertugas menyusun, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPID. Menyusun peraturan dan keputusan KPID

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

dengan kelembagaan serta kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak lain dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

a. Kerjasama Antar Lembaga.

KPID Provinsi Lampung telah melakukan MOU (*memory of understanding*) dengan polda lampung, kejati Lampung dan Panwas Pemilu, adapun maksud dan tujuan dari MOU tersebut adalah:

- MOU yang dilakukan dengan Polda Lampung bertujuan untuk menegakkan hukum pidana di bidang penyiaran.
- MOU yang dilakukan dengan kejati Lampung bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.¹³⁰

MOU yang dilakukan dengan Panwas Pemilu bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Literasi Media

KPID Provinsi Lampung melakukan Literasi Media yang bertujuan mensosialisasikan hak dan kewajiban pendengar/pemirsa radio dan

¹³⁰ *Ibid.*

televise agar konten isi siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik.¹³¹

c. Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

KPID Provinsi Lampung mengadakan pelatihan SDM pengelola lembaga penyiaran yang bertujuan untuk meningkatnya SDM professional.¹³²

d. Pembuatan Buku Profil Lembaga Penyiaran

KPID membuat buku profil lembaga penyiaran yang bertujuan sebagai dokumentasi lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.¹³³ sehingga masyarakat mengetahui dan memahami dunia penyiaran di provinsi lampung melalui buku tersebut.

e. KPID Award

KPID Provinsi Lampung mengadakan KPID Lampung Award yang bertujuan memberikan penghargaan bagi insane televisi dan radio.¹³⁴ Dengan diadakan nya KPID Award setiap tahunnya, ini juga berguna untuk memacu kualitas lembaga penyiran menjadi lebih baik.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

II. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan bertugas menyusun peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi penyiaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPID menyangkut isi siaran. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, menata, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.¹³⁵

a. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran

KPID Provinsi Lampung melakukan pemantauan terhadap acara atau siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran baik melalui alat monitoring ataupun turun langsung ke lokasi lembaga penyiaran.

b. Monitoring Lembaga Penyiaran

KPID Provinsi Lampung melakukan pengawasan langsung ke lapangan mengenai keberadaan lembaga penyiaran yang ada di provinsi lampung.

c. Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

KPID Provinsi Lampung mengadakan kegiatan pengkajian isi siaran yang bertujuan menemukan isu-isu seputar penyiaran serta menyamakan pemahaman bersama *stakeholder* penyiaran di provinsi lampung.

¹³⁵ *Ibid.*

d. Penertiban Pengaduan Masyarakat

Dalam hal ini KPID Provinsi Lampung melakukan Evaluasi hasil aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi dari masarakat yang masuk ke KPID Provinsi Lampung,¹³⁶

III. Bidang Perizinan

Bidang Perizinan bertugas penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia (HAM). Pengaturan Infrastruktur penyiaran, serta pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait.¹³⁷

a. Pengembangan Komunikasi dan Informasi

KPID Provinsi Lampung melakukan Verifikasi Faktual terhadap lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Lampung baik televisi maupun radio.¹³⁸

b. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Kegiatan ini adalah untuk proses awal dari perizinan pendirian radio dan televisi.¹³⁹

c. Forum Rapat Bersama (FRB)

Rapat ini adalah tindak lanjut dari hasil EDP yang diselenggarakan oleh Kementrian KOMINFO RI untuk melakukan tahapan berikutnya.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

d. Penilaian Uji Coba Siaran Lembaga Penyiaran

Rapat ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio untuk melakukan siaran serta untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).¹⁴⁰

5. Kode Etik KPID Lampung dalam Pengawasan Isi Siaran

Keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa. Masing masing lembaga memiliki peraturannya sendiri, begitu pula dengan KPID Provinsi Lampung sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, bahwa dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan dari Undang-undang Penyiaran no 32 tahun 2002, yang merupakan peraturan pemerintah. Kemudian diturunkan P3SPS yang merupakan peraturan KPI maupun KPID.

“Dalam melakukan pengawasan sebenarnya bukan dinamakan kode etik, melainkan rujukan kerja. Kalo Undang-undang No.32 Tahun 2002 ya itu dari Undang-Undang. Kalo P3SPS itu peraturan KPI/KPID dari turunan Undang-Undang. Jadi rujukan pertama Undang-undang No.32 tahun 2002, lalu diturunkan P3SPS. Bedanya kalo Undang-Undang itu lebih ke umum atau secara keseluruhan, tapi kalo P3SPS itu lebih Khusus yang mengatur tentang penyiaran. Jadi kita pakai P3SPS itu atas dasar turunan dari UU.”¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Sri Wahyuni, STP. Wawancara Koorbid. Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 20 Februari 2018

Undang-undang 32/2002 sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber diatas, merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.

Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran (SPS) merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Dalam hal ini penulis melampirkan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang menyangkut pelanggaran program siaran Tegar TV pada tahun 2016, sebagai berikut:

Pedoman Prilaku Penyiaran (P3)

BAB XIV

Muatan Program Siaran Terkait Rokok, Napza, Dan Minuman Beralkohol Pasal 18

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol.

BAB XV
Muatan Program Siaran Terkait Perjudian
Pasal 19

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian.

Standar Program Siaran (SPS)

BAB XII
Pelarangan Dan Pembatasan Seksualitas
Bagian Pertama
Pelarangan Adegan Seksual
Pasal 18

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- a) menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
- b) menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- c) menayangkan kekerasan seksual;
- d) menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- e) menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- f) menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
- g) menampilkan adegan ciuman bibir;
- h) mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;
- i) menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- j) mengesankan ketelanjangan;
- k) mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- l) menampilkan kata-kata cabul.¹⁴²

BAB XIII
Pelarangan Dan Pembatasan Kekerasan
Bagian Pertama
Pelarangan Adegan Kekerasan
Pasal 23

¹⁴² Dokumen Pedoman P3SPS KPID Provinsi Lampung

Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;
- b. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan;
- c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- d. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- e. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

**Bagian Kedua
Ungkapan Kasar dan Makian
Pasal 24**

- (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.
- (2) Kata kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

**BAB XIV
Pelarangan Dan Pembatasan Materi Siaran Rokok, Napza, Dan Minuman Beralkohol
Bagian Pertama
Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran
Pasal 26**

- (1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.¹⁴³

**Bagian kedua
Pembatasan Rokok, Napza dan minuman beralkohol dalam program siaran
Pasal 27**

¹⁴³ *Ibid.*

- (1) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/ atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

BAB XV
Pelarangan Dan Pembatasan Muatan Perjudian
Bagian Pertama
Pelarangan Perjudian dalam Program
Siaran
Pasal 28

- (1) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.
- (4) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.

BAB XVII
Penggolongan Program Siaran
Bagian Pertama
Klasifikasi Program Siaran
Pasal 33

- (1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 – 12 tahun;
 - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.¹⁴⁴
- (2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya,

¹⁴⁴ *Ibid.*

- yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran
- (3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.

Bagian Ketiga
Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran
Pasal 43

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;
- h. tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan
- i. tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

BAB XXI
SENSOR
Pasal 55

- (1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditayangkan sebelum disiarkan.
- (2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.
- (3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dan (2) di atas tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan peraturan ini.

Bab XXVII
Program Kuis, Undian Berhadiah, Dan Permainan Berhadiah Lain
Pasal 70

- (1) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan penipuan.
- (3) Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau *Short Message Services (SMS)* wajib memberitahukan secara jelas, lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.¹⁴⁵

Peraturan mengenai standar program siaran tersebut mengandung batasan-batasan, pelarangan, kewajiban dan peraturan penyiaran berdasarkan pedoman prilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI dan KPID yang berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan Tegar TV pada tahun 2016.

B. Gambaran Umum Tegar TV.

1. Profil Tegar TV

Lahirnya Tegar TV di Lampung pada 10 maret 2005. PT. Tegar Multimedia Tivi sebagai badan hukum lembaga penyiaran swasta penyelenggara jasa penyiaran televisi yang berbasis stasiun lokal di Bandar Lampung dan menempati kanal 42 UHF, yang berlokasi di gedung Graha Pena Panca Bhakti. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Kedaton, Bandar Lampung.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Dokumen Tegar TV Lampung Tahun 2016

Tegar TV kini akan memasuki usia ke-9 tahun, semakin menegaskan positioning nya sebagai satu-satunya televisi lokal yang menayangkan 100% produk lokal dengan menjunjung nilai kearifan lokal. 24 jam bersama masyarakat Lampung, hadir dengan program mengedukasi, menghibur dan bermanfaat serta menghadirkan informasi factual, balance dan klarifikasi.

Dari gagasan sederhana untuk membentuk media yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung, maka manajemen Tegar TV yang kala itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu H. Nurdiono, Edi Purwanto (Don Poci) dan seorang teman merencanakan untuk mendirikan sebuah stasiun TV Lokal di Lampung yang akomodatif terhadap kepentingan orang banyak.¹⁴⁷

Dari proses perizinan dan uji coba siaran serta evaluasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dan KPI Pusat, maka akhirnya PT.TEGAR TV mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tetap, yang berlaku hingga 24 Desember 2020. Setelah ini, Tegar TV akan lebih bersemangat untuk mewujudkan cita-cita menjadi media yang baik dan bermanfaat di Lampung, melalui siaran yang santun, mendidik, cerdas dan bersahabat.

Tegar TV tetap kritis dalam koridor bersahabat kepada siapa saja. Baik dengan pihak pemerintah daerah beserta dinas dan instansi dibawahnya di seluruh Provinsi Lampung, dengan para pengusaha dan lapisan masyarakat lainnya.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Sebagai televisi lokal tentu Tegar TV ingin diterima di semua lapisan masyarakat Lampung. Tegar TV ingin menjadi bagian dari masyarakat, sehingga Tegar TV memposisikan diri sebagai televisi keluarga (*Multi Segmen*). Pemirsa Tegar TV memiliki karakter khas masyarakat Lampung. Yaitu: bersifat dinamis, memiliki fanatisme yang tinggi terhadap budayanya, solidaritas yang kuat, lugas dan ekspresif, memiliki keingintahuan yang tinggi, senang terlibat dalam acara televisi dan agamis.

Guna terwujudnya hal tersebut, maka Tegar TV membuat program acara yang lebih menekankan pada konten lokal dengan banyak melibatkan masyarakat sebagai objek acara yang disajikan secara live dan interaktif.¹⁴⁸

Tabel 1.1
Data Perusahaan

No	Nama	Keterangan
1	Nama Perusahaan	PT.TEGAR TV
2	Call Sign/Frekuensi	TEGAR TV/UHT 42
3	Alamat Studio	Jl.ZA Pagaralam No.12/14 Gedung Meneng Bandar Lampung
4	Positioning	News & Entertainment
5	Perijinan	IPPT KEMENTRIAN KOMINFO NO 32.KEP/M.KOMINFO/2/2011
6	Coverage Area	Bandar Lampung,Lampung Tengah, Lampung Selatan , Pringsewu, Metro, Pesawaran, Lampung Utara, Tulang Bawang Sebagian dan Tulang Bawang Barat Sebagian
7	Tagline 2017	Jak Kham Jama Jama

Sumber: Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016.

¹⁴⁸ Dokumentasi Tegar TV tahun 2016

Tabel 1.2
Program Siaran

No	Nama	Keterangan
1	Format Siaran	MULTI SEGMENT (FAMILY)
2	Waktu Siaran	06.00-23.59 WIB
3	Konten Program	News, Talk Show, Musik, Kesehatan, Pendidikan dan Budaya

Sumber: Dokumentasi Tegar TV 2016.

Tabel 1.3
Komposisi Siaran

No	Komposisi Siaran	Keterangan
1	Information	35%
2	Education	20%
3	Entertainment	45%

Sumber: Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016.

Tabel 1.4
Profil Penonton

No	Nama	Keterangan
1	Berdasarkan Kelompok Usia	
	20 s.d 25 Tahun	20%
	25 s.d 39 Tahun	30%
	40 Tahun ke atas	30%
2	Berdasarkan Pekerjaan	
	Anak-anak	5%
	Pelajar	15%
	Mahasiswa	30%
	Pekerja	50%

Sumber : Dokumentasi Tegar TV tahun 2016.

2. Visi dan Misi Tegar TV Lampung

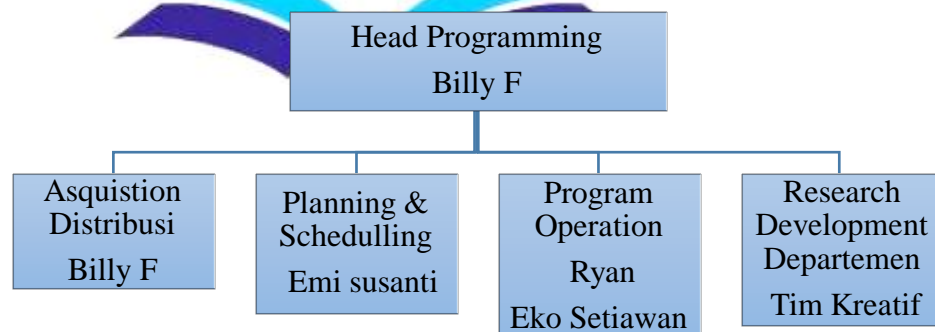
a) Visi

Mampu menjadi mitra terdepan bagi setiap element masyarakat yang membangun Provinsi Lampung.¹⁴⁹

b) Misi

- Menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program-program yang sesuai dengan masyarakat lampung
- Menjadi Patner masyarakat dan pemerintah daerah dalam mensukseskan program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat Lampung
- Menghadirkan Program-Program yang memiliki Unsur Kearifan Lokal yang menggambarkan kebudayaan masyarakat lampung.
- Sebagai jendela informasi masyarakat Lampung dengan menghadirkan program program unggulan yang bermuatan Edukasi, Sosial, Budaya, Teknologi dan lain-lain.¹⁵⁰

3. Susunan Organisasi Tegar TV bagian Pemograman



¹⁴⁹ Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016

¹⁵⁰ *Ibid.*

Sumber: Dokumentasi Tegar TV Lampung Tahun 2016.¹⁵¹

4. Deskripsi Program Acara Tegar TV yang melanggar periode Tahun 2016

1) Program Berita

a) Ada Apa Lampung

Adalah program acara berita yang memberikan informasi faktual yang terjadi di masyarakat. Acara ini dipandu oleh news anncor yang berada di studio.¹⁵² Program tayang setiap hari pukul 07:00-08:00 WIB (Rerun/Siaran ulang) 19:00-20:00 WIB. Segmentasi : R-BO.¹⁵³

2) Program News

a) Liputan Khusus

Adalah sebuah program yang menyajikan informasi seputar ekonomi, politik, social, serta serba serbi baik pemerintah maupun masyarakat. Program tayang setiap hari pagi dan malam. Pukul 08:00-09:00 WIB dan 20:00-21:00 WIB. Segmentasi: R-BO.¹⁵⁴

b) Jewel In The Palace

¹⁵¹ Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016.

¹⁵² Ryan. Wawancara Program Operation Tegar TV Lampung, Tanggal 22 Februari 2018

¹⁵³ Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Adalah serial drama korea yang bercerita mengenai kehidupan sejarah dinasti korea. Program tayang setiap hari senin-jumat. Pukul 10:00-11.00 WIB. Segmentasi R-BO.¹⁵⁵

c) Condor Heros

Adalah sebuah serial televisi tiongkok yang berdasarkan pada novel *wuxia The Return of The Condor Heroes* karya Jin Young. Program tayang setiap hari senin-jum'at. Pukul 10.00-11.00 WIB. segmentasi R-BO.¹⁵⁶

d) The heirs

Adalah program siaran asing yang berasal dari luar negeri (korea) drama korea, penayangannya terdapat terjemahan bahasa Indonesia, dengan latar cerita anak anak muda pewaris tahta. Program tayang setiap hari senin-jumat pukul 10:00-11:00 WIB. Segmentasi:R-BO.¹⁵⁷

e) Sore sore seru

Adalah program acara mengenai musik serta informasi menarik lainnya seputar kaula muda. Program ini ditayangkan baik itu di studio

¹⁵⁵ Observasi Tegar TV tahun 2018

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

maupun di luar studio. Program ini tayang setiap hari pukul 14.00-15.00 WIB.

Segmentasi: R-BO¹⁵⁸

f) Dendang Nusantara

Adalah program siaran berupa lagu lagu nusantara. Program tayang setiap hari dengan penayangan yang bisa 1 sampai 3 kali penayangan, pukul 7.30, 11.00, 12.30. Segmentasi R-BO.¹⁵⁹

g) Lagu religi

Adalah program acara yang bersifat entertainment (hiburan) namun juga berbau syiar. Program tayang setiap mulai pukul 18:30-19:00 WIB. Segmentasi: R-BO

h) Mozaik

Adalah program acara yang membahass mengenai kerajinan, kreasi unik anak bangsa, baik itu di lampung maupun di luar lampung. Program ini merupakan program yang unik dan menginspirasi. Program tayang setiap senin, pukul 19:30-20:00WIB. Segmentasi: Umum

¹⁵⁸ Dokumentasi Tegar TV Tahun 2016

¹⁵⁹ *Op.Cit.*

i) Salam Anda

Adalah program acara request lagu ke orang-orang dengan cara bertanya langsung kepada orang tersebut dimanapun tempatnya. Dengan terlebih dahulu diajak berbincang-bincang lalu diperbolehkan request lagu apa saja yang langsung akan diputar sesuai request-an tersebut. Program ini tayang setiap hari jum'at pukul 19:30-20:00 WIB. Segmentasi: R-BO

j) Tiyuh Budaya

Adalah program acara yang menyajikan keindahan serta kearifan budaya lampung mulai dari kultur, budaya, bahasa serta adat istiadat budaya lampung. Program tayang setiap hari rabu dan sabtu, pukul 19:30-20:00WIB. Segmentasi: Umum.¹⁶⁰

C. Pengawasan KPID Lampung Terhadap Program Siaran Tegar TV Tahun 2016.

1. Proses Pengawasan dan Tindakan Pembinaan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung yang merupakan lembaga Negara Independet yang mengatur segala hal mengenai penyiaran yang tugas, fungsi dan wewenangnya telah diatur oleh Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.¹⁶¹ Suatu lembaga yang memiliki fungsi memperbaiki

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Dokumen KPID Lampung Tahun 2016

siaran di Indonesia, serta tugas mengawasi kegiatan penyiaran dan memberikan sanksi kepada stasiun televisi yang melakukan pelanggaran.

Maka dalam menjalankan tugas nya dalam proses pengawasan KPID Lampung terhadap Televisi Lokal Tegar TV yang merupakan stasiun TV lokal yang paling banyak melanggar P3SPS di tahun 2016, menggunakan strategi yaitu dimulai dari perencanaan, pengawasan, tindakan dan pembinaan.

- a) Perencanaan yang dimaksud ialah pelaksanaan harus sesuai dengan tahapan yang ditentukan, Seperti yang di ungkapkan oleh Koorbid.Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran.

“Pertama Perencanaan dari kami berupa perencanaan program-program serta stasiun TV mana saja yang akan di awasi, analisis pelanggaran, lalu apa tindakan atas pelanggaran itu yang sesuai dengan P3SPS, lalu kita tindak. Kami juga melakukan Reward dan panishment, yang artinya KPID akan memberikan award setiap tahunnya.”¹⁶²

Dalam perencanaan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak KPID melakukan perencanaan terlebih dahulu stasiun TV mana saja yang akan di awasi salah satunya Tegar TV, Merumuskan konteks dan tujuan sebagai persiapan pra penelitian, diagnosis masalah, lalu Merencanakan tindakan dan Melaksanakan tindakan. KPID juga melakukan perencanaan yakni *reward dan punishment*. *Reward* yang dimaksud ialah memberikan apresiasi terhadap karya lembaga penyiaran yang mampu memberikan

¹⁶² Sri Wahyuni,STP. Wawancara Korbid.Pengawasan & Pembinaan Isi Siaran KPID Lampung, Tanggal 20 Februari 2018.

tayangan atau program yang baik dan berkualitas. Sedangkan *punishment* ialah memberikan sanksi dalam bentuk hukuman pada program-program siaran atau tayangan yang melanggar ketentuan sesuai P3SPS, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Tegar TV. Kegiatan ini akan diadakan setiap tahun yang dinamakan KPID Award. Berikut pernyataan secretariat Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran Sari Prima Reiza, S.H

“Tujuan diadakannya KPID Award setiap tahun itu tujuannya memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang menayangkan isi siaran dan program siaran yang sesuai dengan ketentuan dari KPID yaitu P3SPS yang berisikan peraturan tayangan yang layak ditonton dan yang tidak layak. Semua di cross cek sama komisioner kita dengan KPID award yang merupakan ajang pemberian apresiasi kepada lembaga penyiaran yang berkualitas, otomatis mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, jadi menurut saya KPID Award ini positif sekali dalam memancing terciptanya siaran yang berkualitas.”¹⁶³

Dari pernyataan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak KPID dalam hal perencanaan melakukan kegiatan tahunan berupa KPID Award yang bertujuan guna memicu pertelevisian semakin berkualitas, khususnya televisi lokal. dimulai dari perencanaan tersebut KPID mulai melakukan pengawasan sepanjang tahun tersebut.

- b) Pengawasan, pada tahap ini berkaitan sangat erat dengan perencanaan. Karena dari tahap perencanaan tersebut, KPID yang dibantu oleh Tim Monitoring melakukan pengawasan kepada stasiun TV yang sudah direncanakan yaitu stasiun TV lokal Tegar TV.

¹⁶³ Sari Prima Reiza, S.H. Wawancara Kasie.Pembinaan & Pembinaan KPID Provinsi Lampung, 20 Februari 2018.

“Pengawasan yang kami lakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan langsung dan tak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan P3SPS oleh Tim Monitoring dengan cara memonitor (menonton) tayangan yang sedang ditayangkan oleh stasiun TV tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah melalui pengaduan masyarakat (call center) yang jika ada temuan akan dilakukan cross cek langsung kelapangan ataupun langsung turun kelapangan dengan melakukan program acak.”¹⁶⁴

Dari narasumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPID terhadap Tegar TV yaitu dengan Pengawasan langsung yang berupa pengawasan secara langsung oleh tim monitoring terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan dan pengawasan tidak langsung adalah bentuk aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak KPID.

Pengawasan ini dilakukan secara terus menerus guna mengetahui kelemahan, kesalahan tindak dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar kesalahan tersebut terulang kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Henny Destiani, SE dari Tim Pengawasan Monitoring.

“Kami bertugas untuk mengawasi siaran televisi lokal khusus untuk di wilayah lampung aja. Tugas kami memantau isi siaran dengan mekanisme kerja pengawasan melalui layar monitor dengan acara yang sedang berlangsung. Kami melakukan pengawasan setiap hari sampai malam jam 7:30 sampai jam 22:00 yang dibagi menjadi 2 shief

¹⁶⁴ *Op.Cit.*

dengan jumlah 5-6 orang setiap pengawasan, dari jam 7:30-15:00 orang nanti over shief dari jam 15:00-22:00.”¹⁶⁵

Elvita Sari,S.Kom dari Tim Pengawasan Monitoring juga menambahkan.

“Kalau system kerja kami ini kan tugasnya membantu komisioner dalam menjalankan tugas nya. Jadi kami yang memantau dengan cara menonton semua program acara siaran TV lokal, jika ada pelanggaran yang berdasarkan buku pedoman kita yaitu P3SPS maka kami akan catat lalu rekamannya kami serahkan kepada komisioner. Untuk mengenai sanksi serta yang memberi surat teguran itu bagian komisioner seperti koorbid. Pengawasan dan pembinaan isi siaran.”¹⁶⁶

Dari kedua narasumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa bagian Tim Pengawasan Monitoring yaitu melakukan pengawasan dengan cara memantau isi siaran Tegar TV dengan mekanisme kerja memantau selama kurang lebih 24 jam setiap hari, mencatat indikasi pelanggaran berdasarkan buku pedoman KPID yaitu P3SPS dan menyerahkan hasil pengawasannya kepada pihak komisioner yang bertugas memberikan sanksi.

Kegiatan ini sangat membantu kinerja anggota komisioner KPID khususnya bagian pengawasan dan pembinaan isi siaran, karna dari data yang didapatkan oleh tim monitoring, komisioner dapat menjalankan perannya dalam mengawasi penyiaran khususnya di lampung terlebih pengawasan yang dilakukan akurat yaitu dengan melihat sendiri apa yang sedang terjadi atau ditayangkan, sehingga jika terdapat pelanggaran pihak dari lembaga penyiaran tersebut tidak dapat berkilah.

¹⁶⁵ Heni Destriani,SE. Wawancara Tim Pengawasan Monitoring Tanggal 20 Februari 2018.

¹⁶⁶ Evita Sari,S.Kom. Wawancara Tim Pengawasan Monitoring Tanggal 20 Februari 2018.

c) Tindakan, setelah mendapatkan laporan dari proses pengawasan baik pengawasan langsung dan tidak langsung pihak KPID langsung melakukan tindakan mulai dari pemberian teguran, pembatasan durasi hingga pemberhentian program acara tergantung dari jenis pelanggarannya.

“Dalam tahap ini setelah proses pengawasan yang dilakukan Tim monitoring terdapat pelanggaran berupa catatan pelanggaran sesuai apa yang didapat Tim monitoring pada saat pengawasan. Pertama kita harus melihat data data terlebih dahulu, kita lihat kita analisis menggunakan pedoman kita yaitu P3SPS untuk melihat pelanggaran ini masuk ke pasal berapa. data data yang terkait Tegar TV inikan mulai dari tidak adanya klasifikasi acara, visualisasi orang merokok sampai dengan visualisasi yang menampilkan adegan ciuman bibir wanita dan pria. Kami melakukan peneguran, kita panggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap program siaran tersebut. apabila terjadi pelanggaran kembali akan kita berikan sanksi dan itu akan kita tingkatkan”¹⁶⁷

Beliau juga menambahkan.

“Kami melayangkan surat teguran ke pihak Tegar TV, dimulai teguran I dan dilanjutkan teguran ke II. Bagi stasiun TV yang melanggar semua pasti kita tindak. Itu kami bukan hanya ke Tegar TV, tapi kesemua stasiun TV yang melanggar ketentuan P3SPS”¹⁶⁸

Dari pernyataan narasumber di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPID yang dibantu oleh Tim Monitoring. Jika terdapat pelanggaran yang didapat dari hasil pengawasan akan langsung ditindak oleh Komisioner. Artinya, apabila dalam pengawasan tersebut terdapat pelanggaran atau pun penyimpangan

¹⁶⁷ Sri Wahyuni. *Op. Cit.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

maka langsung diadakan tindak koreksi seperti memberikan teguran kepada lembaga penyiaran tersebut.

Pada tahap ini pula pihak KPID yang melayangkan surat teguran terhadap Tegar TV terlebih dahulu mencatat pelanggaran yang didapat dari hasil pemantauan atau pengawasan langsung, kemudian memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi dari hasil temuan tersebut yang berdasarkan surat teguran setelah itu akan dibina. Dalam dunia penyiaran langkah ini lebih tepat agar siaran menjadi lebih baik serta kesalahan tidak terulang kembali.

d) Pembinaan, setelah melalui tahap Perencanaan, Pengawasan dan Tindakan.

Maka langkah selanjutnya ialah pengendalian. Dalam hal ini Sri Wahyuni, S.TP.S.Sos. selaku Koordibid. Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran menjelaskan bahwa.

“Setelah melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan stasiun TV mana saja, pengawasan langsung dan tak langsung serta tindakan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran, sampailah pada tahap pembinaan. Dalam hal ini pembinaan yang kami maksud ialah pembinaan dengan cara pengendalian. Membina stasiun TV yang melanggar, kita bina, kita ajak sharing. Kita beritahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh disiarkan, kita ingatkan lagi mengenai P3SPS, barangkali mereka melakukan kesalahan itu karna lupa atau lalai mengenai pedoman pertelevisian kan. Kita jelaskan bahwa media Televisi ini kan fungsinya sebagai pendidikan salah satunya, jika isinya saja tidak mendidik itu bisa merusak generasi bangsa. Maka kita terus melakukan pembinaan jika terdapat pelanggaran, baik sudah dapat surat teguran maupun belum.”¹⁶⁹

¹⁶⁹ *Ibid.*

Dari narasumber-narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa Tegar TV yang mendapat surat teguran akan dipanggil untuk mengklarifikasi program acara tersebut, setelah itu akan dibina, dengan tujuan kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar kegiatan dalam organisasi tersebut berjalan sesuai rencana dan pengawasan tersebut memiliki tahapan-tahapan pokok yang berkaitan satu sama lain.

Perencanaan, Pengawasan, Tindakan serta Pembinaan (pengendalian) ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dalam dunia penyiaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Kegiatan ini juga merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi tersebut sesuai dengan rencana. Serta anggota Komisioner dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

Dalam menjalankan peran nya terhadap isi siaran *informan* Tamri, S.Hut selaku ketua KPID Provinsi Lampung mengatakan bahwa KPID sudah menjalankan fungsi, peran serta tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti dengan kooperatifnya lembaga penyiaran terhadap teguran KPID dengan melayangkan klarifikasi secara tertulis. Hal ini menjadi indikasi bahwa keberadaan KPID serta P3SPSnya telah diakui oleh lembaga penyiaran. Tinggal sekalarang bagaimana semua unsure bersinergi demi kebaikan dan kemajuan masyarakat dan bangsa.

“Sesungguhnya kami telah berusaha secara maksimal mungkin agar KPID Provinsi Lampung ini bisa menjalankan fungsi nya dengan baik. Dalam beberapa masalah kami telah menjalankan dengan baik. Terkait dengan peran KPID dalam mengawasi isi siaran TV lokal di Provinsi Lampung kami telah berusaha dengan baik dan pihak pihak yang terlibat pun telah secara kooperatif mendukung kinerja kami. Buktinya setiap lembaga yang kami tegur terkait isi siarannya yang bermasalah selalu ada upaya mereka untuk mengklarifikasi dan menjelaskan duduk persoalannya kepada kami.”¹⁷⁰

Mengenai penegakan peraturan, kewenangan KPID dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS dari KPID hanya berbentuk Evaluasi Dengar Pendapat dan pemberian rekomendasi kelayakan kepada pemerintah untuk tayangan yang dianggap paling melanggar, yang nantinya akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah menyangkut perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sementara itu untuk pelanggaran yang ringan KPID akan memberikan sanksi administratif dari mulai melayangkan teguran secara tertulis, pemberhentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi siaran sampai denda administratif.

“Kami merasa sudah menjalankan peran kami secara optimal dalam memberikan sanksi secara tertulis baik teguran I sampai II terhadap penyiaran yang dianggap melanggar ketentuan P3SPS dan agar ada efek jera dari lembaga penyiaran . Namun jika lembaga penyiaran tersebut masih terus menerus melakukan pelanggaran terhadap ketentuan P3SPS maka KPID akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar ketika lembaga penyiaran tersebut memperpanjang Izin Siaran maka perlu dipertimbangkan track record lembaga bersangkutan yang sering melanggar P3SPS”.¹⁷¹

¹⁷⁰ Tamri,S.Hut. Wawancara Ketua KPID Provinsi Lampung, 20 Februari 2018

¹⁷¹ Sri Wahyuni.*Op.Cit.*

Dalam menjalankan Perannya, KPID merasa telah menjalankan perannya secara optimal, serta dapat menata struktur penyiaran kearah yang lebih baik sebagai lembaga pengawasan penyiaran dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Berkenaan dengan kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Tegar TV yang merupakan stasiun TV lokal yang paling banyak melanggar P3SPS ditahun 2016 tidak menolak, karena mereka melihat bahwa sebuah Negara perlu adanya lembaga penyiaran pemerintahan independent. Tujuannya agar sistem penyiaran dapat terhindar dari campur tangan yang terlalu besar dari pihak pemerintah pusat dan juga menjadikan sistem penyiaran di Indonesia khususnya Provinsi Lampung menjadi lebih baik lagi.

“Kalau kehadiran KPID Provinsi Lampung kami tidak pernah menolak kehadiran mereka. Karna kami paham dunia penyiaran sekarang semakin maju dan berkembang baik di daerah maupun di pusat maka memang perlu adanya lembaga Negara independent khususnya di dunia penyiaran. Ini juga bertujuan agar sistem penyiaran di Indonesia semakin berkualitas. Jadi perlu digaris bawahi bahwa pihak kami Tegar TV tidak keberatan dengan adanya pengawasan dari pihak KPID Provinsi Lampung”.¹⁷²

Kemudian keberadaan P3SPS menurut Emi Susanti menilai bahwa keberadaan P3SPS itu sangat penting untuk mengatur apa yang boleh dan

¹⁷² Billy.F.Wawancara Kepala Pemograman dan Distribusi Tegar TV tanggal 22 Februari 2018.

tidak boleh dalam *content* siaran. Hal ini diungkapkan oleh Emi Susanti selaku perencanaan dan penjadwalan Tegar TV lampung.

“Keberadaan P3SPS itu memang sangat penting, kita mendukung karena baik penyiaran nasional maupun lokal harus ada yang mengatur. Terbukti dengan adanya pengawasan dari pihak KPID berlandaskan oleh peraturan P3SPS di tahun 2016 kami banyak melanggar, kami dipanggil di kasih surat teguran, kami dibina, mana yang boleh mana yang tidak boleh disiarkan, itu kami dikasih tau. Sehingga kami menyadari kesalahan itu akibat kelalaian kami. Kita perbaiki semaksimal mungkin dan di tahun 2017 alhamdulillah kami bisa meminimalisir pelanggaran”.¹⁷³

Dari pernyataan dari beberapa narasumber di atas terkait keberadaan P3SPS sebagai pedoman bagi KPID dalam mengawasi siaran TV lokal, pihak Tegar TV yang merupakan salah satu lembaga penyiaran yang tercatat memiliki catatan pelanggaran terbanyak ditahun 2016 tidak keberatan adanya pengawasan dari KPID Lampung beserta pedomannya yaitu P3SPS.

Tegar TV berpendapat bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh KPID ialah sesuai dengan pedoman P3SPS. Tegar TV juga tidak keberatan dengan adanya surat teguran mengenai pelanggaran yang mereka lakukan, karena dengan adanya bantuan pengawasan dari pihak KPID, Tegar TV merasa bisa menjadi lebih baik, karena belajar dari kesalahan sebelumnya. Sehingga didapatkan pada tahun 2017 pelanggaran dapat diminimalisir.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Lampung dengan melakukan 4 strategi dalam mencapai perannya sebagai lembaga independent

¹⁷³ Emi Susanti. Perencanaan Penjadwalan Tegar TV Lampung, 22 Februari 2018.

yang mengawasi setiap penyiaran ialah Perencanaan, Pengawasan, Tindakan serta Pengendalian. Hal tersebut sangat membantu dalam menjalankan tugas peran serta KPID Lampung dalam pertelevisian khususnya Lembaga Penyiaran Lokal Tegar TV menjadi lebih baik.

2. Kaijan Pelanggaran Tahun 2016.

Berdasarkan pengawasan pihak KPID Lampung yang melakukan pengawasan langsung pada program siaran Tegar TV pada tahun 2016, beberapa program tidak menjalankan ketentuan isi berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal ini dibuktikan dengan data dan fenomena berikut yang menunjukkan bagaimana pengawasan Program siaran televisi yang dilakukan untuk melihat penyimpangan penyimpangan yang melanggar ketentuan tersebut.

Berikut adalah kasus pelanggaran Tegar TV yang dimonitoring oleh KPID Provinsi Lampung tahun 2016:

No	Nama Program	Pasal	Mengenai
1	The Heirs	SPS 18	Visualisasi menampilkan ciuman bibir antara pria dan wanita
2	Ada apa lampung	SPS 26, 33 dan 43	Visualisasi menampilkan orang sedang merokok, tidak menampilkan klasifikasi acara dan bermuatan kekerasan
3	Lipsus	SPS 26 dan 33	Visualisasi menampilkan orang sedang merokok dan tidak menampilkan klasifikasi acara

4	Sore-sore seru	SPS 33 SPS 70	Tidak menampilkan klasifikasi acara dan visualisasi menampilkan call center tanpa menampilkan keterangan yang berlaku
5	Lagu Religi	SPS 33	Tidak menampilkan Klasifikasi acara
6	Salam Anda	SPS 33	Tidak menampilkan Klasifikasi acara
7	Mozaik	SPS 33	Tidak menampilkan klasifikasi acara
8	Tiyuh Budaya	SPS 33	Tidak menampilkan Klasifikasi acara
9	Dendang Nusantara	P3 18 dan 19. SPS16 (2) huruf c , 26 (1), 27 (2) dan 28 (1)	Visualisasi Penggunaan Rokok, adegan perjudian serta lirik lagu yang tidak pantas.
10	Jewel In The Palace	SPS 23 huruf b 24 (1) dan 55 (1)	Menampilkan tubuh yang berdarah (tidak di blur), menampilkan ungkapan kasar dan tidak menampilkan tanda lulus sensor.
11	Condor Heros	SPS 18 huruf I dan 24 (1,2)	Visualisasi subtitle adegan seksual dan menampilkan ungkapan kasar dan makian.

Sumber: Dokumen Tegar TV Pembinaan & Pengawasan KPID T.A.2016.¹⁷⁴

Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPID Provinsi Lampung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tegar TV dalam beberapa program siaran mereka, maka KPID melayangkan surat teguran sebagaimana KPID melayangkan 5 surat teguran kepada pihak Tegar TV terkait pelanggaran dari beberapa program acara yang melanggar diatas, Yaitu Condor Heroes, Jewel

¹⁷⁴ Dokumen KPID Pelanggaran Tegar TV Tahun 2016.

In The Palace, Ada Apa Lampung, The Heirs dan Dendang Nusantara yang berpotensi menimbulkan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat dan beberapa yang tidak mendapat surat teguran seperti Salam Anda, Tiyuh Budaya, Lagu Religi, Mozaik, Lipusus dan Sore-sore Seru.

1) Program Siaran Bermuatan Seksual.

Di kategori ini terdapat program siaran yang melakukan pelanggaran berbau seksual dan sejenisnya. Adegan-adegan ini terdapat dalam tayangan drama, seperti program siaran Tegar TV *The Heirs* dan *Condor Heroes*.

“Dalam kasus ini berdasarkan catatan pengawasan dari kami, program acara tersebut masuk kedalam Program Siaran berbau Seksual yang masuk kedalam P3 16. karena dalam siaran tersebut menampilkan adegan ciuman, visualisasi berpelukan sampai *subtitle* yang berbau seks dengan SPS 18 dan itu kita beri sanksi administrative berupa surat teguran”.¹⁷⁵

Seperti *The Heirs* pada tanggal 26 November 2016 yang menampilkan visualisasi ciuman bibir antara wanita dan pria masuk kedalam SPS 18 huruf g.¹⁷⁶ Dan *Condor Heros* yang disiarkan pada tanggal 9 Agustus 2016. penayangan tersebut telah melanggar SPS pasal 18 huruf l.¹⁷⁷

Pada kedua program siaran tersebut terdapat pelanggaran yang sama yaitu mengenai tayangan yang berbau seksual yang masuk kedalam pasal 18 huruf (g) tentang menampilkan adegan ciuman dan (i) tentang menampilkan

¹⁷⁵ Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos. Wawancara Korbid.Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018.

¹⁷⁶ Dokumen KPID Lampung 2016

¹⁷⁷ *Ibid.*

kata kata cabul Program siaran tersebut dengan menampilkan visualisasi sub title yang menggambarkan adegan seks.

Beliau menambahkan.

“Pelanggaran dalam kategori seksual ini layak mendapat teguran karna menampilkan perilaku tak patut ditiru seperti itu dalam memberikan kesan lazim kepada penonton”.¹⁷⁸

Dari pernyataan diatas pelanggaran terkait seks, merupakan perilaku yang tidak patut ditiru. Kategori sensual dan seksualitas, baik berupa gambar, gerakan, maupun subtitle. Karena tampilan tersebut jika ditayangkan terus menerus maka akan menumbuhkan kesan biasa dan lazim untuk dilakukan sehingga memicu orang untuk melakukannya.

Berdasarkan pelanggaran diatas, KPID Lampung memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis kepada Tegar TV pada program siaran *Condor Heroes*, nomor surat /KPID-LPG/II/2016 pada 15 Agustus 2016.¹⁷⁹ Dan untuk program acara *The Heirs* pihak KPID memberikan surat teguran namun tidak ditahun 2016, melainkan di tahun 2017.

2) Program Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan

Program siaran drama korea *Jewel In The Palace* yang disiarkan oleh Stasiun Tegar TV pada tanggal 18,19,20,21 dan 22 Januari 2016. Penayangan tersebut telah melanggar Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia

¹⁷⁸ Sri Wahyuni. *Op.Cit.*

¹⁷⁹ Dokumentasi Surat Teguran Tegar TV tahun 2016.

Tahun 2012, pasal 23 huruf b, pasal 24 ayat (1), dan pasal 55 ayat (1). KPID Lampung memberikan sanksi administrative *Teguran Tertulis./KPID-LPG/II/2016* pada 5 Februari 2016.¹⁸⁰

Kemudian pada *Condor Heroes* yang tayang pada tanggal 10,11 dan 12 Agustus tersebut telah melanggar SPS pasal 24 ayat (1 dan 2). Berdasarkan pelanggaran tersebut KPID memberikan Teguran Tertulis dengan nomor/KPID-LPG/II/2016 pada 15 Agustus 2016.bersamaan dengan pelanggaran mengenai tayangan bermuatan seksual yang tayang pada tanggal 9.¹⁸¹

Berdasarkan dokumen surat teguran yang dilayangkan KPID terhadap Tegar TV, Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos. menjelaskan terkait pelanggaran tersebut.

“Dari hasil pengawasan mengenai program siaran tersebut kan terdapat pelanggaran jadi kita beri surat teguran, karena Program siaran tersebut tidak menampilkan surat keterangan lulus sensor. Pada tayangan tanggal 20 Januari menampilkan luka yang berdarah tidak disamarkan (blur) terkena pasal 23 huruf b. Pada tayangan tanggal 22 Januari 2016, terkena pasal 24 ayat (1) karena pada program siaran tersebut menampilkan kata kasar ‘bodoh’ kepada anak-anak (tertulis pada terjemahan).”¹⁸²

Dari pernyataan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa, pelanggaran tersebut melanggar ketentuan P3SPS pada BAB XIII mengenai pelanggaran dan pembatasan kekerasan bagian pertama pasal 23 terhadap

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos. Wawancara Korbid.Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018.

pelarangan adegan kekerasan dan bagian kedua pasal 24 mengenai ungkapan kasar dan makian.

3) Muatan Program Siaran Terkait Rokok.

Pelanggaran pada program siaran “*Ada Apa Lampung*” tanggal 19 juli dimana terdapat pelanggaran yang bermuatan rokok dengan SPS 26 sebanyak 40 kali. Sehingga KPID memberikan surat teguran dengan Nomor. 87/KPID-LPG/2016 Tanggal 21 juli 2016.¹⁸³

Dendang Nusantara Program siaran ini melakukan pelanggaran pada tanggal 9 dan 11 Februari 2016. Program siaran tersebut menampilkan pria merokok SPS 26 dan pasal 16 ayat (2) huruf c. Berdasarkan pelanggaran diatas, KPID Lampung memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis I. nomor surat /KPIDLPG/II/2016 dikeluarkan tgl 16 Februari 2016.¹⁸⁴

Namun pelanggaran terulang tanggal 22 Maret 2016. Penayangan tersebut telah melanggar P3 pasal 18, serta SPS pasal 26 ayat (1), dan pasal 27 ayat (2). Berdasarkan pelanggaran di atas, KPID Lampung memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis II. Surat /KPID-LPG/II/2016 dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2016.¹⁸⁵

“Mengenai adegan penggunaan rokok ini dilarang sesuai P3 pasal 18 dilarang menampilkan visualisai orang merokok. Sesuai SPS 26

¹⁸³ Dokumentasi Surat Teguran Tegar TV tahun 2016.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

program siaran tidak boleh membenarkan penyalahgunaan rokok sebagai hal yang lumrah dan boleh dilakukan setiap hari. Maka dari itu pelanggaran tersebut kami beri surat teguran, karena mereka dalam proses peliputan men-shot orang yang sedang merokok, walaupun itu tidak sengaja. Dan harusnya sebelum di tayangkan itu mereka harus cek dulu, sesuai tidak dengan P3SPS. Itu kan masalahnya penggunaan rokok itu mereka tidak memblur”¹⁸⁶

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, pelanggaran yang menampilkan visualisasi orang merokok. Ini kesalahan dan kekurangan pengetahuan dari pihak crew yang mengambil gambar pada saat liputan terjadi. Karena berdasarkan P3 Pasal 18 lembaga penyiaran wajib tunduk kepada ketentuan pelarangan yang menampilkan muatan terkait rokok, napza dan minuman berakohol

4) Sensor

Tidak menampilkan lulus sensor, pelanggaran ini terjadi pada program siaran drama korea atau program asing yaitu *Jewel In The Palace*. Program siaran pada tanggal 18, 19, 20, 21 dan 22 januari 2016 tersebut tidak menampilkan keterangan lulus sensor. Sehingga KPID melayangkan surat teguran /KPID-LPG/II/2016 pada 5 Februari 2016 mengenai SPS Pasal 55 ayat (1).¹⁸⁷

Berkenaan dengan hal itu, KPID memberikan sanksi administratif kepada Tegar TV karena itu merupakan Program Siaran Asing yang

¹⁸⁶ Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos. Wawancara Korbid.Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018.

¹⁸⁷ Dokumentasi Surat Teguran Tegar TV 2016

diwajibkan tunduk pada peraturn perundang-undangan yang berlaku. Sri Wahyuni,S.TP selaku Koorbid. Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran menjelaskan.

“Tanda lulus sensor ini perlu, apalagi itu program asing yang tidak mereka produksi sendiri, mereka tidak tau dalam program siaran tersebut ada konten apa. Sehingga program siaran dalam bentuk film atau drama wajib menampilkan pernyataan lulus sensor. Kenapa? Karena dengan adanya tanda lulus sensor oleh lembaga itu membuktikan bahwa program siaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan.sesuai dengan P3 tentang Program Siaran Asing pasal 45.”¹⁸⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak Tegar TV selaku yang menayangkan program siaran asing harus lebih teliti dan berhati-hati lagi terhadap isi siaran dalam konten tersebut, sebagaimana lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran tersebut ke khalayak ramai atau penonton, wajib terlebih dahulu melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran yang dimuat dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan P3SPS yang berlaku.

5) Penggolongan Program Siaran

Pada program siaraan yang ditayangkan oleh pihak Tegar TV rata rata tidak menampilkan klasifikasi acara sesuai ketentuan SPS mengenai penggolongan Program Siaran pasal 33 ayat 1 ,2 dan 3. Seperti Lipsus, Sore-sore seru, Mozaik, Tiyuh Budaya, Salam Anda, Lagu Religi dan ada apa

¹⁸⁸ Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos. Wawancara Korbid.Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018.

Lampung. Pelanggaran tersebut tercatat di dokumen KPID terkait pelanggaran Klasifikasi Acara.

“Berdasarkan pemantauan kami, Tegar TV belum menampilkan klasifikasi acara sesuai dengan jam tayang dan batasan usia penonton, terutama untuk melindungi anak dan remaja dari tontonan yang bukan diperuntukan bagi usia mereka. Sebagaimana yang dimaksud ialah lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran atau penggolongan usia secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran sesuai SPS Pasal 55 serta wajib memberi peringatan atau himbauan bimbingan orang tua yang ditayangkan pada awal program siaran”¹⁸⁹

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa lembaga penyiaran televisi Tegar TV wajib menayangkan klasifikasi program siaran berdasarkan usia dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu P(2-6), A(7-12), R(13-17), D(18+) dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran tersebut dan wajib memberikan himbauan mengenai bimbingan orang tua yang ditampilkan pada awal program acara dimulai, sehingga lebih mudah dipahami.

Namun walaupun pelanggaran ini dicatat di dokumen sebagai pelanggaran, pihak KPID tidak memberikan sanksi administratif. Beliau menjelaskan terkait tidak dikeluarkannya surat teguran terhadap pelanggaran mengenai klasifikasi acara.

¹⁸⁹ Sri Wahyuni, STP.S.Sos. Wawancara Koorbid. Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018

“Kalau soal klasifikasi acara sudah kita ingatkan berkali-kali kepada seluruh lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, namun bukan lewat surat teguran atau surat peringatan. Kita ingatkan pada saat pembinaan. Karena klasifikasi acara ini rentan terjadi, mangkanya kita selalu ingatkan sosialisasikan mengenai klasifikasi acara. Takutnya mereka itu tidak tau mengenai klasifikasi acara, maka dari itu kita tidak beri surat teguran melainkan kita ingatkan, kita bina selalu sosialisasikan”¹⁹⁰

Hal tersebut juga diungkapkan Billy (Kepala Pemograman dan Distribusi Tegar TV) terkait pelanggaran klasifikasi acara.

“Mengenai penggolongan usia itu sebenarnya kami selalu dapat peringatan pada saat sosialisasi karena kan itu sering terjadi sebenarnya di kalangan media. Jadi untuk yang pelanggaran penggolongan usia sepanjang tahun 2016 itu murni kelalaian kami. Kami tidak melupakan aturan P3SPS sebagai pedoman, karena kesalahan itu murni kelalaian kami”¹⁹¹

Dari pernyataan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pihak KPID khususnya Koordib. Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran mengenai beberapa program siaran yang tidak mendapat teguran terkait pelanggaran mengenai klasifikasi acara, pihak KPID hanya mengingatkan melalui pembinaan dan pada saat sosialisasi. Karena untuk klasifikasi ini memang sering terjadi, itu mungkin karena ketidak pahaman mengenai klasifikasi acara atau *Miss Komunikasi* sehingga harus dijabarkan satu persatu terkait penggolongan acara.

Setelah mendapat sanksi administratif teguran terkait pelanggaran beberapa program siaran yang seperti Ada Apa Lampung, Condor Heroes,

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Billy.F.Wawancara Kepala Pemograman dan Distribusi Tegar TV tanggal 17 Maret 2018.

Dendang Nusantara dan Jewel In The Palace yang dilakukan oleh Tegar TV, pihaknya mengakui itu kesalahan dari mereka. Berikut pernyataan dari Ryan selaku Program Operation.

Untuk kesalahan-kesalahan yang sudah diawasi oleh pihak KPID, pertama kami mengucapkan terimakasih, karena dengan adanya pengawasan tersebut kami dapat mengetahui kesalahan kami, serta kelalaian kami sebelum memasarkan acara tersebut ke khalayak. Ya kami akui kami lalai serta kurang jeli.”¹⁹²

Beliau juga menambahkan.

“Untuk kesalahan pada saat proses produksi seperti yang merokok tidak di blur itu kita akui kecerobohan atau kelalaian kami sampai hal tersebut lolos dari pembluran. Lalu mengenai program siaran asing yang terdapat adegan ciuman, kekerasan, dan kata kata kasar. Itu kelalaian juga karena itu kami tidak memproduksi sendiri, itu program asing yang kita tayangkan kembali di Tegar TV dan kami tidak tau atas konten yang ada di dalam program tersebut. dan mengenai klasifikasi acara jika terjadi kesalahan kami selalu diingatkan kembali atau diberi peringatan. Kami minta maaf itu kesalahan kami, kami lalai.”¹⁹³

Berdasarkan hasil kajian pelanggaran yang dilakukan Tegar TV terkait program acara yang mereka tayangkan sepanjang tahun 2016 yang dilakukan KPID Provinsi Lampung serta masukan dari lembaga atau individu maka KPID melayangkan surat teguran kepada Tegar TV sebagaimana pelanggaran yang dilakukan di program acara tersebut.

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pihak KPID melayangkan sanksi administratif yaitu 5 surat

¹⁹² Ryan. Wawancara Program Operation Tegar TV Lampung, Tanggal 17 Maret 2018

¹⁹³ Ryan. *Ibid.*

teguran kepada pihak Tegar TV terkait pelanggaran dari beberapa program acara yang melanggar diatas, Yaitu Condor Heroes, Jewel In The Palace, Ada Apa Lampung dan Dendang Nusantara. Karena, menampilkan adegan tidak mendidik dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi yang menonton karena mengandung adegan kekerasan, makian atau ungkapan kasar sampai adegan seksual. Hal tersebut sangat berbahaya terhadap perkembangan anak-anak, remaja, dewasa maupun masyarakat pada umumnya.

Mengenai program siaran yang tidak mendapat teguran dari KPID terkait pelanggaran penggolongan usia. Penulis mengambil kesimpulan bahwa sejauh ini pihaknya terus melakukan peringatan dan pembinaan terkait yang melakukan pelanggaran kalsifikasi acara pada saat sosialisasi yang berdasarkan P3SPS, karena dikhawatirkan ketidakpahaman mengenai penggolongan acara.

Kehadiran KPID yang memiliki wewenang mengawasi isi siaran televisi, diharapkan pertelevisian semakin terkontrol dengan adanya KPI Pusat dan KPI Daerah, sehingga siaran yang ditampilkan berkualitas dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi para penonton. Dari hasil monitoring daftar table diatas serta surat teguran dan sosialisasi yang dilakukan membuktikan bahwa peran KPID dalam mengawasi siaran TV lokal sudah berjalan dengan optimal.

Tegar TV merupakan salah satu stasiun TV lokal provinsi lampung yang diawasi oleh pihak KPID Lampung, sehubungan dengan hal tersebut, Tegar TV memiliki *track record* atau catatan pelanggaran paling banyak di tahun 2016 sepanjang 2016-2017.

Sehingga solusi setelah adanya peneguran serta pembinaan dari pihak KPID terhadap pihak Tegar TV, efeknya tahun 2017 lembaga penyiaran Tegar TV jauh lebih bagus atau ada perubahan. setelah adanya pembinaan tahun 2017 tidak banyak temuan pelanggaran yang terjadi. Diperkuat pada tahun 2017, Tegar TV lampung mendapatkan *Award* dalam kategori *Future* dalam acara KPID Lampung Award 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017 kemarin. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa KPID Lampung sudah menjalankan perannya secara Optimal terkait Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Tegar TV.

3. Hambatan dalam Mensosialisasikan Program KPID Terhadap Isi Siaran Tegar TV.

Besarnya pengaruh siaran televisi terhadap masyarakat membuat siaran televisi mempunyai dampak negatif sehingga perlu untuk diawasi oleh lembaga Negara yang independent. Namun pada proses pengawasan terhadap isi siaran televisi yang dilakukan oleh KPID Provinsi Lampung seringkali terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengawasan.

1) Kurangnya Kepahaman (*Miss Komunikasi*)

Seperti hambatan yang dirasakan KPID terhadap Tegar TV, seperti yang dijelaskan oleh Sri Wahyuni,S.TP.S.Sos.

“Hambatannya itu mungkin *miss komunikasi* antara kami dan pihak Tegar TV pada saat sosialisasi, mengenai pelanggaran yang terjadi itu kan berdasarkan P3SPS. Sedangkan kita sudah sosialisasikan bahkan waktu pengajuan IPP. Namun jika pelanggaran tersebut terjadi kemungkinan ada ketidak pahaman antara pihak Tegar TV atau mereka lupa, maka dari itu kami selalu sosialisasi ke media, salah satunya ya itu kami ingatkan kembali, kita bina lagi.”¹⁹⁴

Dari pernyataan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa hambatan dalam proses mensosialisasikan program KPID terhadap isi siaran Tegar TV ialah adanya ketidak pahaman apa yang disampaikan KPID atau kelalaian dari pihak Tegar TV. Diperkuat hasil wawancara Ryan selaku Program Operation Tegar TV Lampung.

“Untuk kesalahan-kesalahan yang sudah diawasi oleh pihak KPID, pertama kami mengucapkan terimakasih, karena dengan adanya pengawasan tersebut kami dapat mengetahui kesalahan kami, serta kelalaian kami sebelum mempasarkan acara tersebut ke khalayak seperti yang merokok tidak di blur, adegan ciuman, kekerasan, sampai klasifikasi kami akui kami kurang jeli sehingga lolos dari pembluran. kesalahan itu murni kelalaian kami”¹⁹⁵

Dari pernyataan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak lembaga penyiaran televisi Tegar TV tidak melupakan aturan yang ada di

¹⁹⁴ Sri Wahyuni,STP.S.Sos. Wawancara Koorbid.Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, 15 maret 2018

¹⁹⁵ Ryan. Wawancara Program Operation Tegar TV Lampung, Tanggal 17 Maret 2018

P3SPS yang telah disosialisasikan oleh KPID. Namun pihaknya menyadari telah melakukan kelalaian dalam bekerja sehingga pelanggaran tersebut terjadi dari pernyataan diatas diketahui bahwa itu kesalahan murni akibat kurang jeli nya oprator sehingga adegan adegan yang tidak semestinya bisa lolos dari pembluran.

2) Kurangnya Pengetahuan serta Peran Orang Tua

Seperti yang dijelaskan oleh koorbid. Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran

“Kurangnya pengetahuan dari masyarakat ini lah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyraakat akan tontonan yang baik dan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar serta partisipasi dari masyarakat diperlukan. Karena dengan masyarakat yang kritis akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID Lampung sehingga dapat memperbaiki penyiaran yang tidak mendidik jadi mendidik, dan yang tidak berkualitas menjadi berkualitas.”¹⁹⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala berasal dari kurang nya partisipasi masyarakat sehingga KPID Lampung mengarapkan keikutsertaan masyarakat akan dunia penyiaran, sehingga dunia penyiaran menjadi berkualitas serta mendidik. Beliau juga menambahkan.

“Peran serta orang tua dalam mendampingi anak anak saat menonton televisi juga sangat penting. karna pada saat anak anak menonton mereka belum tau mana yang baik ditonton mana yang tidak baik ditonton. Kami juga mencoba sosilisasi mulai dari mahasiswa sampai ke rekan rekan mulai dari mengenalkan KPID ke mereka dan

¹⁹⁶ Sri Wahyuni,STP. Wawancara Koorbid. Pembinaan & Pengawasan Isi Siaran KPID Lampung, 15 Maret 2018.

memberikan pengetahuan mengenai pertelevisian, kami juga menghimbau kepada mereka untuk ikut berpartisipasi”¹⁹⁷

Dari pernyataan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat menonton televisi sangat penting. Karena jika anak-anak mengonsumsi tontonan orang dewasa, nilai-nilai yang dianut mereka cenderung sama dengan nilai-nilai yang digambarkan tontonan dewasa tersebut, dengan cara demikian dapat mengurangi dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kemajuan televisi.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hambatan dalam proses mensosialisasikan program KPID Lampung terhadap Tegar TV ialah adanya ketidakpahaman atau kelalaian dari pihak lembaga penyiaran Tegar TV, sehingga kesalahan terus terjadi. Serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat akan tontonan yang baik dan yang tidak baik. Karena partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi siaran diperlukan dan termasuk pengawasan tidak langsung terhadap siaran televisi. Peran serta orang tua dalam dunia penyiaran juga diharapkan KPID sebagai langkah awal dalam membantu dalam memerangi tayangan yang tidak mendidik dan yang tidak berkualitas dalam dunia penyiaran. Sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif dari media televisi.

¹⁹⁷ *Ibid.*

BAB IV

PERAN KPID DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TELEVISI LOKAL DI BANDAR LAMPUNG

Bab ini merupakan bagian yang membahas tentang analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal terhadap Isi Siaran Tegar TV periode tayang tahun 2016. Alasan penulis mengambil tahun 2016 dikarenakan lebih banyak pelanggaran di tahun tersebut dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat adanya Peran penting Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung dalam mengawasi Isi Siaran Tegar TV. Pada pembahasan ini akan di jelaskan Peran yang dilakukan KPID Lampung dalam Proses Pengawasan yang dilakukan kepada Tegar TV yang merupakan stasiun televisi lokal yang paling banyak melanggar di tahun 2016.

Televisi yang merupakan media massa serta sarana informasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah penulis paparkan di bab II, dengan begitu mewajibkan kita untuk lebih menyaring apa yang ditayangkan di televisi karena sifatnya yang sangat terbuka untuk umum atau bisa ditonton oleh semua kalangan, menjadikannya sulit untuk mengontrol dampak negatifnya. Kecendrungan para pengelola televisi yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi sehingga sering kali mengesampingkan norma dan etika yang berlaku.

Sehingga kita sebagai umat muslim harus cerdas dalam memilih, menonton dan mencerna informasi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teiti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keberadaannya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(QS. Al-Hujuraat:6)

Artinya setiap program televisi harus dapat memberikan manfaat kepada khalayak ramai yang melihatnya yang secara umum memberikan informasi, mendidik dan menghibur. Dalam hubungan nya dengan televisi Lokal, berbagai program siaran yang memiliki konten news, talk show, music, kesehatan, pendidikan sampai dengan budaya. Terkadang terjadi pelanggaran pada saat proses program acara tersebut di buat atau di proses. Untuk itu maka di perlukan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

KPID sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahkan aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPID yang penulis maksud dalam skripsi ini ialah KPID Lampung yang terletak di Jalan Bougenville No.06, Rawa Laut Bandar Lampung. Dalam menjalankan Perannya pihak KPID Lampung bertugas mengawasi beberapa stasiun TV lokal yaitu lampung TV, Siger

TV, Tegar TV Krakatau TV dan Radar TV. Dari beberapa stasiun TV di atas, Tegar TV lah yang memiliki catatan pelanggaran terbanyak siaran berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di tahun 2016.

Peran KPID Lampung, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di provinsi lampung. sebagai warga Negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu KPID Lampung dalam menjalankan fungsinya yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

Berdasarkan fakta yang telah penulis sebelumnya maka KPID Lampung memiliki peran dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagai lembaga yang mengawasi stasiun Tegar TV, yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar

Dalam hal ini KPID diwajibkan untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan akurat. Sehingga peran KPID melalui sosialisasi kepada media tentang hak dan kewajiban televisi agar konten isi atau siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik. Berdasarkan hasil penelitian KPID Lampung terdapat program siaran Tegar TV yang tidak sesuai dengan pedoman penyiaran seperti berbau seksual, terkait rokok, kekerasan serta makian kata kata kasar. Sehingga KPID Lampung mulai membuat peraturan pedoman, menjelaskan atau mendemostrasikan

pelaksanaan pedoman yang sesuai. karena menurut KPID Lampung tayangan yang layak dan benar itu adalah tayangan yang bersifat mendidik, baik dan sehat sehingga bisa diterima dimasyarakat.

Dilihat dari fakta di atas bisa dikategorikan sifat dan waktu pengawasan Pendahuluan(*feedforwardcontrol*) yang merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dan pengendalian ini adalah pengendalian yang terbaik karena dilakukan sebelum kesalahan terjadi.

2. Membantu memperbaiki sistem penyiaran Tegar TV menjadi lebih baik

Peran ini KPID terus melakukan berbagai macam kegiatan demi terlaksananya peran yang efektif. membantu memperbaiki sistem penyiaran Tegar TV adalah upaya lebih ekstra yang dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga Tegar TV dapat memahami aturan yang berlaku berdasarkan pedoman Pedoman prilaku penyiaran dan Standar Program Siaran. Seperti program siaran yang menayangkan adegan penggunaan rokok, seharusnya Tegar TV menghindari adanya adegan itu dengan cara memblur atau sebisa mungkin tidak menshoot adegan tersebut. Maka dari itu KPID Lampung juga mengadakan pelatihan SDM lembaga penyiaran Tegar TV guna meningkatkan SDM pengelola lembaga penyiaran yang professional.

Berdasarkan temuan di atas dapat dikategorikan KPID Lampung dalam menjalankan perannya masuk kedalam pengawasan umpan balik (*feedback Controll*) yang merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang KPID Lampung harapkan.

3. Pemantaun Setiap Program Siaran yang ditayangkan oleh Tegar TV

KPID Lampung berperan melakukan pemantauan terhadap acara atau siaran yang dilakukan oleh Tegar TV pada tahun 2016. Dalam hal ini KPID Lampung melakukan kegiatan berupa pemantauan terhadap program siaran yang sedang ditayangkan Tegar TV baik news, music, talk show maupun drama dengan bantuan tim monitoring.

Dari hasil pemantauan tersebut KPID Lampung menemukan program siaran yang tidak sesuai dengan pedoman kode etik penyiaran yang ditayangkan Tegar TV pada tahun 2016 seperti tayangan yang berbau seksual, terkait rokok, kekerasan serta kata kata kasar. Sehingga KPID Lampung menganalisi sebab-sebab terjadinya kesalahan, menilai dan mencari tindakan perbaikannya.

Pengawasan ini merupakan pengendalian setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar kesalahan itu tidak terulang

kembali, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Peran KPID ini dapat dikategorikan dalam pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).

4. Memberi pembinaan kepada Tegar TV untuk menerapkan pedoman yang berlaku.

KPID Lampung dalam kesempatan ini berperan melakukan pembinaan terhadap Tegar TV guna mengingatkan agar lembaga pertelevisian tersebut selalu menerapkan pedoman yang berlaku yaitu P3SPS, KPID Lampung membina agar Tegar TV menjaga kualitas tayangannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini KPID Lampung menjalankan peran dengan langkah pembinaan tersebut apabila terdapat tayangan yang tidak sesuai dengan pedoman P3SPS.

Berdasarkan fakta diatas Peran KPID Lampung dalam menindaklanjuti Tegar TV masuk ke dalam *pengawasan Respresif* dengan cara memberikan pembinaan dengan upaya agar Tegar TV dapat menjaga kualitas tayangannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi.

5. Menindaklanjuti Pelanggaran pada program siaran Tegar TV tahun 2016

Dalam hal ini KPID Lampung harus memastikan tindakan apa saja yang dilakukan ketika ada lembaga penyiaran di Lampung melakukan kesalahan, sehingga tindakan yang diambil diharapkan lembaga penyiaran dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran kembali. Tindaklanjut yang dilakukan KPID Lampung dalam mengambil keputusan berupa peringatan meminta klarifikasi dari Tegar TV terkait pelanggaran program siaran.

Berdasarkan fakta diatas Peran KPID Lampung dalam menindaklanjuti Tegar TV masuk ke dalam *Pengawasan represif* dengan cara memberikan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis, pemanggilan serta evaluasi terkait pelanggaran. *Pengawasan represif* ini merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi.

Dilihat dari 5 peran yang dijalankan oleh KPID Lampung sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi program siaran Tegar TV pada tahun 2016 dengan menyesuaikan P3SPS yang merupakan pedoman KPID sebagai kode etik.

Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan peraturan KPI yang berisi peraturan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan dalam suatu program siaran. Ditengah persaingan antar industry yang

begitu ketat, ide-ide kreatif tak jarang mengesampingkan norma-norm dan aturan yang berlaku dimasyarakat yang berujung penyuguhan acara yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Sehingga P3SPS dirasa sangat penting guna mengontrol konten isi siaran yang berdampak negatif.

Bila terjadi kesalahan atas P3SPS, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang melakukan pelanggaran tersebut. Seperti halnya pada Lembaga penyiaran Tegar TV dimana program siarannya ditahun 2016 sering kali melanggar pedoman perilaku penyiaran.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap P3SPS akan dicatat dan direkam oleh KPID Lampung dan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi KPID Lampung dalam memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran tersebut, termasuk dalam hal perpanjangan izin siaran.

Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti sah dan menyankinkan melanggar P3SPS yang berlaku akan dijatuhkan sanksi dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Dari hasil penelitian didapati Tegar TV tidak menjalankan ketentuan isi program siaran yang sesuai dengan P3SPS. Hal ini di buktikan dengan data, fenomena dan contoh kasus berikut yang menunjukkan bagaimana Peran KPID dan Proses Pengawasan Program Siaran Televisi terhadap Isi Siaran Tegar TV pada tahun 2016 (Terlampir).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dalam menjalankan Perannya dalam Pengawasan isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung terhadap stasiun TV lokal yang paling banyak memiliki catatan pelanggaran di tahun 2016 yaitu Tegar TV melalui beberapa proses.

Dari 5 peran yang dijalankan KPID Lampung yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, diketahui melahirkan proses dalam melaksanakan peran tersebut sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan yang dilakukan oleh KPID Lampung terhadap Tegar TV lampung digambarkan bahwa proses perencanaannya dengan merumuskan konteks dan tujuan sebagai pra-penelitian yang merencanakan stasiun TV mana saja yang akan diawasi, lalu diagnosis masalah berdasarkan P3SPS yang telah mereka buat, setelah itu mereka mulai merencanakan sanksi apa yang sesuai dengan diagnosis masalah tersebut, kemudian melakukan tindakan, setelah melakukan tindakan barulah mereka melakukan evaluasi, dengan melakukan *reward dan punishment* dalam KPID Award untuk menguji apakah ini cocok atau tidak dalam menyelesaikan masalah.

Selanjutnya KPID mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program Siaran. Dalam melakukan pengawasan KPI dan KPID mengawasi dengan 2 cara yaitu *Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung*. Pengawasan langsungnya berupa pengawasan oleh KPID

terhadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan P3SPS dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas proses perencanaan ini masuk kedalam kategori pengawasan *Preventif* yang merupakan pengawasan yang ditujukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan.

2. Proses Pengawasan, pada setiap lembaga penyiaran untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang melanggar Standar Program Siaran (SPS). KPID Lampung mengawasi dengan 2 cara yaitu Pengawasan *langsung* dan pengawasan *tidak langsung*. Pengawasan langsungnya berupa pengawasan oleh KPID terhadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.

Berdasarkan temuan yang didapat dari hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh KPID Lampung terhadap Tegar TV dengan 2 cara yaitu secara langsung dan tak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Lampung setiap hari pada jam kerja dari jam 7.30 sampai 10.00 malam oleh anggota tim pengawasan (*tim monitoring*) menggunakan alat yang sudah disediakan oleh KPID Lampung berupa server untuk memantau siaran yang serang berlangsung dan Pengawasan tidak langsung adalah melalui aduan

masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Lampung. KPID juga melakukan pengawasan secara *internal* dan *eksternal*.

Pengawasan dari dalam (*internal*) yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota atau tim yang dibentuk dalam organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan dari luar (*eksternal*) yang pengawasannya dilakukan oleh orang diluar organisasi tersebut.

Dalam proses ini pengawasan yang dilakukan KPID Lampung terhadap Tegar TV masuk dalam Sifat *pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control)*, yang dilakukan ketika sedang terjadi penyimpangan dengan cara mencatat pelanggaran yang muncul pada program siaran Tegar TV sesuai dengan P3SPS.

3. Tindakan. hal ini KPID melakukan tindakan berupa sanksi administratif teguran kepada pihak Tegar TV terkait pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016 berupa surat teguran I dan II. Dari hasil monitoring tercatat dari 11 pelanggaran yang dilakukan Tegar TV pada tahun 2016. KPID melayangkan 5 surat teguran yang dilayangkan kepada beberapa program acara, yaitu:

1. Condor Heroes.

Pada program siaran ini KPID Lampung memberikan sanksi administratif berupa surat Teguran Tertulis I berdasarkan pelanggaran Program siaran

bermuatan seksual dan Program siaran bermuatan ungkapan makian serta kasar

2. Jewel In The Palace

Pada program siaran ini KPID Lampung memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis I terkait pelanggaran:

- Program siaran bermuatan kekerasan
- Program siaran bermuatan ungkapan kasar dan makian
- Program siaran tidak menampilkan lulus sensor

3. Ada Apa Lampung

Pada program siaran tersebut KPID Lampung memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis I terkait pelanggaran Program siaran bermuatan adegan penggunaan rokok dan Program siaran bermuatan adegan kekerasan

4. The Heirs

Pada program ini melanggar SPS 18 huruf g yaitu Menampilkan adegan ciuman bibir pria dan wanita. Namun karena penayangan yang diakhir tahun, pihak KPID melayangkan surat Teguran Tertulis I pada tahun 2017.

5. Dendang Nusantara

Pada program siaran ini KPID Lampung memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis I dan II terkait pelanggaran Menampilkan Program siaran penggunaan rokok.

Berdasarkan temuan di atas pihak KPID memberikan surat teguran tertulis Terkait pelanggaran yang menampilkan adegan yang tidak mendidik, sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif dan dikhawatirkan dapat merusak perkembangan anak-anak, remaja, dewasa maupun masyarakat pada umumnya, karena mengandung adegan kekerasan, makian sampai hal yang berbau seksual.

Mengenai program acara yang melanggar klasifikasi acara tidak mendapatkan surat teguran, terkait penggolongan Usia pada program acara Lipsus, Tiyuh Budaya, Salam Anda, Lagu Religi dan Ada Apa Lampung terkait pelanggaran tidak menampilkan Penggolongan Program siaran sesuai ketentuan Standar Program Siaran. KPID sejauh ini terus melakukan peringatan dan pembinaan berupa sosialisasi terkait klasifikasi acara, karena dikhawatirkan terjadi ketidakpahaman apa yang disampaikan KPID terhadap Tegar TV.

Temuan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Sri Wahyuni,S.TP (Koorbid.Pembinaan dan Pengawasan) yang menyatakan bahwa mengenai kasus pelanggaran yang berat pasti akan diberikan surat teguran tertulis, yang kemudian akan dipanggil dan dibina. Sedangkan mengenai pelanggaran klasifikasi acara, pihaknya hanya melakukan peringatan kepada pihak terkait

serta melakukan sosialisasi. Karena klasifikasi acara terbilang lebih teknis sehingga masih perlu adanya peringatan terus menerus.

Dalam proses ini pengawasan yang dilakukan KPID Lampung terhadap Tegar TV bersifat pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan Tegar TV dengan tujuan untuk memperbaiki agar penyiaran selanjutnya tidak menyimpang lagi.

4. Pembinaan. Setelah adanya tindakan berupa peneguran terhadap Tegar TV, maka KPID Lampung terus melakukan pembinaan kepada stasiun TV yang melanggar tersebut dengan fungsi agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh KPID Lampung dengan cara memanggil pihak terkait dan diberi pengetahuan mengenai dampak dari pelanggaran yang terjadi, serta selalu melakukan sosialisasi ke media agar lembaga penyiaran tidak lengah atau lupa terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh KPID Lampung agar konten isi siaran dapat diterima dimasyarakat dengan baik, sehat dan mendidik.

Pembinaan yang dilakukan oleh KPID Lampung terhadap Tegar TV ini dikategorikan sebagai *pengawasan represif* yang merupakan pengawasan yang dilakukan ketika terdapat pelanggaran maka akan langsung di benahi dengan tujuan agar kesalahan tidak terulang kembali. Pengawasan ini

dilakukan KPID Lampung dengan cara pembinaan terhadap pihak Tegar TV dengan mensosialisasi dan mendemonstrasikan tayangan yang sesuai dengan pedoman P3SPS. pembinaan setelah adanya pelanggaran ini efektif dalam memperbaiki sistem penyiaran Tegar TV menjadi lebih baik.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa antara perencanaan, pengawasan, tindakan serta evaluasi ada keterkaitan dalam menjalankan Peran KPID Lampung. Pelaksanaan harus sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan pada perencanaan. Penyimpangan dari perencanaan, berarti suatu kekeliruan, untuk itu perlu segera diambil langkah koreksi secara dini, agar penyimpangan itu tidak semakin besar.

Fakta yang didapatkan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber dari pihak Tegar TV terkait kesalahan pada program siaran yang mereka tayangkan, pihaknya menyadari kesalahan yang terjadi datangnya dari mereka. sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPID Lampung sangat membantu dalam membangun kesadaran pihak Tegar TV terkait pelanggaran tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi pada program siaran yang menampilkan tayangan tidak mendidik tersebut, murni kesalahan dari pihak mereka terkait pembluran. Program acara tersebut lolos dari sensor internal sehingga pihaknya tidak mengetahui konten yang ada dalam acara tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di KPID Lampung, maka penulis mengaitkan Peran KPID dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS. bahwasannya KPID Lampung sudah menjalankan peran sesuai dengan UU dan P3SPS. Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Tegar TV terhadap isi siarannya, sudah ditindaklanjuti dengan teguran-teguran tertulis dan pemanggilan pihak Tegar TV untuk klarifikasi kesalahan-kesalahan dalam penayangan program siarannya. Demikian pula dengan pihak Tegar TV ketika diberikan surat teguran tertulis dan pemanggilan, mereka mematuhi aturan yang diberikan pihak KPID Lampung. Efeknya setelah adanya peneguran serta pembinaan terbukti tidak banyak temuan pelanggaran yang terjadi pada Tegar TV di tahun 2017.

Kaitan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini penulis mendapati jenis pengawasan yang sesuai digunakan KPID Lampung dalam menjalankan Perannya dalam 4 proses pengawasan siaran Tegar TV, yaitu jenis *pengawasan preventif*, *pengawasan concurrent control* dan *pengawasan respresif* yang sesuai dengan tinjauan teori pada bab II dan hasil penyajian data lapangan pada bab III walaupun terdapat sedikit hambatan seperti *Miss Komunikasi* serta kurangnya partisipasi masyarakat akan penyiaran. Namun dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan tidak menghalangi kinerja KPID Lampung dalam menjalankan perannya secara optimal.

Temuan tersebut diperkuat pada saat Tegar TV pada tahun 2017 mendapatkan *Award* atau penghargaan dalam kategori *Future* dalam acara KPID Award 2017, yang

dilaksanakan di Universitas Bandar Lampung, pada tanggal 28 november 2017. Sehingga pengawasan, tindakan serta pembinaan yang dilakukan oleh KPID Lampung berjalan secara optimal atau sukses.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung terhadap isi siaran stasiun TV Lokal yang memiliki catatan pelanggaran paling banyak ialah Tegar TV pada tahun 2016. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam menjalankan Peran nya KPID Lampug melahirkan proses yang dilakukan terhadap Tegar TV dalam proses pengawasan isi siaran yaitu dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, tindakan dan pembinaan dinilai efisien. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa selama ini Peran KPID Lampung dalam Proses Pengawasan Isi Siaran Tegar TV sudah efektif dan optimal sesuai dengan pedoman yang berlaku. Terbukti setelah adanya Peran KPID Lampung, Tegar TV sudah mulai memperbaiki kualitas siarannya dan mendapatkan *Award* dalam kategori *Future* di acara Anugrah KPID Award 2017.

B. Saran

1) Saran Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topic yang sama. Peneliti berharap agar topic ini dan pembahasan

yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

2) Saran Praktis

Saran untuk Tegar TV berdasarkan pelanggaran yang terjadi sebelumnya diharapkan supaya menyajikan program siaran yang lebih mendidik dan berimbang dengan kode etik penyiaran yang berlaku.

3) Saran Umum

Saran untuk masyarakat diharapkan berpartisipasi serta kritis dalam hal dunia penyiaran. Contoh nya dalam memilih tayangan yang mendidik atau tidak. Hal ini sangat penting dalam mengurangi dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kemajuan televisi.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari yang diharapkan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar dapat tercapai tujuan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Selain itu penulis mengharapkan semoga tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang bersifat mawadahi aspirasi masyarakat. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis haturkan ucapan terima kasih dan memohon doa semoga Allah SWT berkenan memberikan pahala berlipat ganda disisi-Nya. Amiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Bakri. 2003 .*Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahan*. Jakarta: Yayasan Kampus IISIP.
- Adi, Rianto.2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Andika Rusli, 2015. *Dampak Siaran Radar TV terhadap Pelaksanaan Shalat Berjamaah Bagi Keluarga Muslim di Perum Gelora Persada Kelurahan Rajabasa Raya Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Menejemen Penelitian* .Jakarta:Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2005. *metodelogi penelitian kuantitatif* . Jakarta: PrenadaMedia.
- Dewi Setyarini, “Siaran Ramadhan: Perlunya Evaluasi Muatan Komedi Pada Program Variety Show”, *Penyiarankita*, (Juli-Agustus 2017)
- Djamal ,Hidajanto dan Andi Fachruddin. 2011. *Dasar-dasar Penyiaran Sejarah,Organisasi,Oprasional dan Regulasi*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Heru. 2008. *industri pertelevisian indonesia sebuah kajian*. Jakarta: Erlangga.
- Effendy,Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahmi , A. Alatas.1997. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*. Jakarta: YPKMD.
- Handyaningrat, Soewarno. 1988. *Pengatur Ilmu Adminstrasi Manejemen*. Jakarta: Masasung
- Kaelan.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: bidang Sosial ,Budaya, Filsafat, Seni ,Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003. Jakkarta: Balai Pustaka.

- Komisi Penyiaran Indonesia ,*Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002*
 .Jakarta:2016
- Koontz,et.al ,1986. *essentials of manegemet*. Singapore: McGraw Hill
- Liweri, Alo . 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*
 .Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset* .Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi
 UII
- Morisson. 2008. *Menejemen Media Penyiaran: strategi mengelola Radio & Televisi*
 .Jakarta: Kencana.
- _____. 2005. *Menejemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio Dan
 Televisi*, Bandung: Ramdina Prakarsa
- _____. 2004. *jurnalistik TV Mutakhir*. Bandung: ramdina prakarsa.
- Muda, Deddy Iskandar. 2003. *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*.
 Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mufid, M. 2005. *Komuikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyana, Dedy. 2006. *metode penelitian kualitatif* .Bandung; Rosda Karya.
- Nasution, Zulkarimein. 1993. *Sosiologi komunikasi Massa*. Jakarta: Universitas
 Terbuka.
- Norobuko,Cholid dan Ahmadi. 1997. *metode penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa* . Depok: Rajagrafindo persada.
- Rahmad, Jalaludin. 2004. *metode penelitian komunikasi* .Bandung: Rosda Karya.
- Rayid, M.Iqbal. 2012. *Masterplan dan Profil Lembaga Penyiaran di Provinsi
 Lampung*, Bandar Lampung: KPID Lampung
- Singarimbun,Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey* .LP3ES. Jakarta: Nanawi ,
 Hadari .
- Siti Masrifa, *Dampak Melalui Radio Siaran (Studi Tentang Siaran Dakwah Wawasan
 Dunia Islam Pada Radio Gema Bunda Kandung)* , Bandar Lampung: Fakultas
 Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung,2004

- Slamet, Margono. 1987. *Membangun Pertanian*, Jakarta :Humas Group.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* .Jakarta: Raja Grafindo.
- Soenarto, RM.2007. *Programa televisi dari penyusunan sampai pengaruh siaran* , Jakarta: FFTV-IKJ Press.
- Sri Wahyuni,S.TP selaku Koordinator Bidang Pengawasan dan Pembinaan KPID Lampung) 4 october 2017.
- Subroto, Darwanto Sastro. 1994. *Produksi Acara Televisi*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sujamto. 1987. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*
- Sutisna, Oteng. 1993. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek* . Bandung: Angkasa
- Teddy Apriyanto, *Dampak Siaran Televisi Mistik Terhadap Nilai-Nilai Aqidah Remaja Islam* , Bandar Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2005
- Wahidin,Samsul. 2006. *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Wahyudi, J.B. 1986. *media komunikasi massa televisi*. Bandung: PT alumni.
- Wahyudi. 1994. *Dasar-Dasar Menejemen Penyiaran* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi. 1996. *Dasar Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi*. Jakarta: Grafiti.
- Wahyuni,Isti nursih. 2014. *Komunikasi Massa*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Wirasasmita, Eddy Suyud. 2012. *Masterplan Penyiaran dan Profil Penyiaran di Provinsi Lampung* . Bandar Lampung:KPID Lampung